

DRAFT RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)



DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2016-2021



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2016

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena berkat Rahmad dan Inayah-Nya jualah akhirnya kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017-2021.

Renstra Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017-2021 ini diharapkan dapat digunakan sebagai arah dan pedoman bagi pelaksanaan berbagai strategi, program, dan kegiatan Tahunan Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara hingga tahun 2021.

Dalam penyusunan Renstra ini kami dibantu oleh berbagai pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu dan oleh karenanya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Renstra Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara ini.

Akhir kata kami menyadari sepenuhnya bahwa Renstra ini masih jauh dari sempurna dan oleh karena itu kritik serta saran sangat kami harapkan guna penyempurnaan, sehingga Pembangunan Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara pada gilirannya nanti dapat mengantarkan masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara dapat menjadi Masyarakat yang Sejahtera berkeadilan.

Tenggarong, Mei 2016

KEPALA DINAS
PERTANIAN DAN PETERNAKAN,

SUMARLAN J., S.P.,M.P.

Pembina Utama Muda
NIP. 19581111 198206 1 003

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	7
BAB II. GAMBARAN UMUM PELAYANAN SKPD	
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD	8
2.2. Sumber Daya SKPD	13
2.3. Kinerja Pelayanan SKPD	19
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD	27
BAB III. ISU-ISU STRATEGIS	
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi.	28
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih	30
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Kaltim.....	34
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kutai Kartanegara (2013 – 2033)	41
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis	45
BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN SKPD	
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD	53
4.2. Strategi dan Kebijakan	55

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF.....	65
BAB VI. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD.....	145
BAB VII. PENUTUP.....	147

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2.1 Jumlah ASN Pegawai Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2015.....	14
2.2 Jabatan dan Jumlah ASN Pegawai Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2015.....	14
2.3 Jumlah ASN Pegawai Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Berdasarkan Pangkat Golongan Tahun 2015.....	15
2.4 Keadaan Pegawai sampai dengan 30 Desember 2015.....	16
2.5 Keadaan Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara sampai 31 Desember Tahun 2015.....	18
2.6 Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011-2015.....	21
2.7 Anggaran dan Realisasi Belanja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011-2015.....	26
3.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Tanaman Pertanian Pangan Propinsi Kalimantan Timur.....	39
4.1 Tujuan, Sasaran yang akan dicapai Dinas TPH 2016-2021...	54
4.2 Faktor Internal dan Eksternal Kabupaten Kutai Kartanegara.....	56
4.3 Matrik Urgensi Faktor Internal.....	57
4.4 Matrik Urgensi Faktor Eksternal.....	58
4.5 Evaluasi Faktor-Faktor Internal Dan Eksternal.....	60

4.6	Formulasi strategi SWOT.....	63
5.1	Matriks Program dan Kegiatan.....	72
6.1	Indikator Kinerja SKPD Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara 2016-2021.....	145

DAFTAR GAMBAR

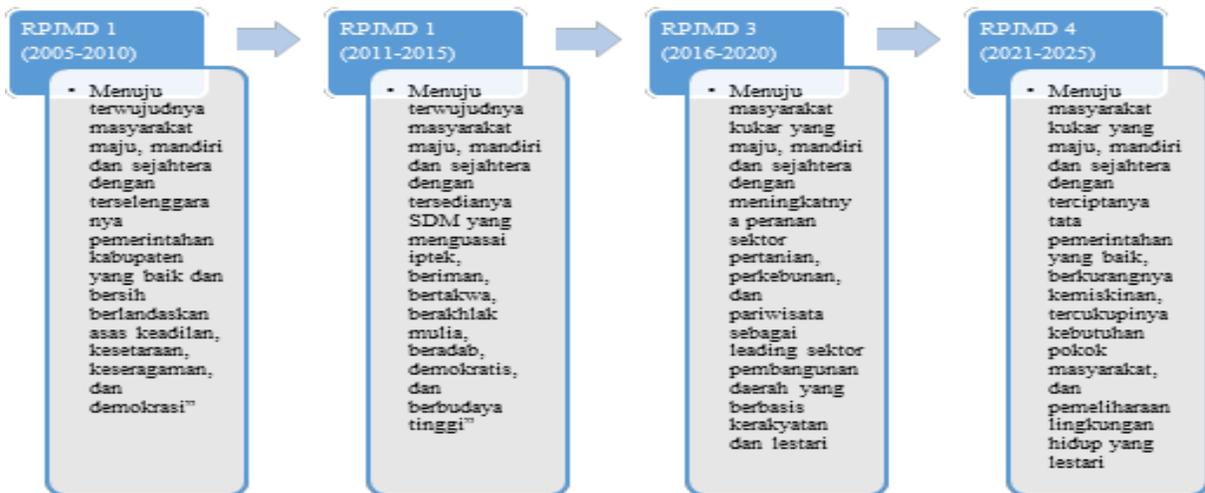
Gambar	Halaman
1.1 RPJDP 2005-2025.....	1
2.2 Struktur Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kutai Kartanegara.....	13
3.1 Diagram Paradigma Gerbang Raja 2016 2021.....	31
4.1 Posisi Kekuatan Organisasi.....	62

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategi (Renstra) Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan dokumen perencanaan pembangunan Pertanian dan Peternakan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Renstra merupakan penjabaran arah dan kebijakan Strategi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 dan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016 - 2021 Kabupaten Kutai Kartanegara serta mengacu pada pembangunan nasional bidang pertanian sebagaimana tercantum dalam dokumen Renstra Kementerian Pertanian (K/L) Tahun 2015-2019.

Dalam RPJPD 2010-2025 tahap 3 tahun 2016-2021 telah ditetapkan bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat Kukar yang maju, mandiri dan sejahtera dilakukan dengan cara meningkatkan peran sektor pertanian, perkebunan, dan pariwisata sebagai *leading sector* pembangunan daerah yang berbasis kerakyatan dan lestari, sebagaimana tertuang dalam RPJPD tahap 3, seperti berikut ini :



Gambar 1.1 RPJDP 2005-2025

Menindaklanjuti hal tersebut, selanjutnya dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun

2016-2021 telah ditetapkan Visi Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara yakni **“Menuju Masyarakat Kutai Kartanegara yang Maju, Mandiri dan Sejahtera”**.

Dalam mendukung pencapaian visi tersebut, Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai peran penting dan strategis. Sebagaimana diketahui bahwa kegiatan di subsektor pertanian dan peternakan merupakan bagian dari kegiatan ekonomi kerakyatan yang melibatkan sebagian besar lapisan masyarakat di Kabupaten Kutai Kartanegara. Hal ini dibuktikan dengan hasil sensus penduduk tahun 2015 penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara berjumlah 870.306 jiwa. Dari jumlah tersebut sebanyak 300.617 jiwa (48 persen) memiliki mata pencarian disektor pertanian dalam arti luas.

Pembangunan Pertanian Kabupaten Kutai Kartanegara secara umum telah dan akan terus memberikan sumbangan bagi pembangunan daerah dalam pembentukan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB), penyerapan tenaga kerja (mengurangi pengangguran), peningkatan pendapatan masyarakat (mengurangi angka kemiskinan) maupun mendukung kondisi yang kondusif dan sinergi dengan sektor lainnya sehingga pelaksanaan pembangunan dapat dilakukan guna untuk mewujudkan tujuan RPJMD tahap 2 tahun 2016-2021 dan Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Strategi pembangunan pertanian tanaman pangan diarahkan guna terciptanya usahatani pertanian dan peternakan yang berorientasi pada agribisnis, agroindustri dan berwawasan lingkungan, sehingga dapat mendukung peningkatan kesejahteraan petani dan kelestarian lingkungan hidup. Adapun agenda utama Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara adalah meningkatkan produksi, produktivitas, mutu, dan daya saing, serta mengoptimalkan penanganan pasca panen dan pemasaran hasil guna menghasilkan nilai tambah produk pertanian yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat tani.

Pada tahun I periode RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2016-2021, yaitu tahun 2016 telah tersusun 3 (tiga) buah dokumen RENSTRA, yaitu : (1) RENSTRA Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, (2) RENSTRA Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan (3) RENSTRA Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan. Mengingat bahwa dalam perkembangannya telah terjadi perubahan lingkungan strategis yang signifikan serta dinamika pembangunan di sub sektor pertanian tanaman pangan, hortikultura dan peternakan serta aspek penyuluhan, maka ketiga RENSTRA tersebut di atas perlu dilakukan penyesuaian (revisi). Adapun perubahan dan dinamika tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
2. Adanya Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, yang mengamanatkan penggabungan sub urusan pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan serta penyuluhan menjadi tugas yang ditangani oleh Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Semakin berkurangnya kemampuan keuangan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang antara lain disebabkan oleh semakin berkurangnya dana perimbangan/dana bagi hasil

Bertitik tolak dari uraian di atas, maka disusunlah revisi rencana pembangunan jangka menengah sub sektor Pertanian dan Peternakan yang tertuang dalam *Rencana Strategis* (RENSTRA) Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 – 2021. Adapun Rencana Strategis (Renstra) disusun guna menjamin keberlanjutan dan konsistensi program pembangunan Pertanian dan Peternakan sekaligus menjaga fokus pencapaian sasaran periode 5 (lima) tahun ke depan, yang dijabarkan setiap tahun ke dalam Rencana Kerja (Renja) OPD.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang mendasari penyusunan Revisi Renstra Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 – 2020, adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRW Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 07 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur 2013 -2018;
11. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai;
12. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013-2033.
13. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016-2021 Kabupaten Kutai Kartanegara;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Revisi Renstra Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara ini, dimaksudkan sebagai acuan kerja penyelenggaraan pembangunan Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura serta Peternakan di Kabupaten Kutai Kartanegara dalam sisa waktu 3 (tiga) tahun terakhir periode RENSTRA 2016 – 2021 dan sebagai dasar perencanaan tahunan untuk tahun 2020 – 2021.

Tujuan penyusunan Revisi Renstra Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara adalah :

1. Menjamin konsistensi dan komitmen perencanaan dan pemilihan program/kegiatan yang disepakati seluruh pemangku kepentingan dan sesuai dengan prioritas serta kebutuhan daerah.
2. Mewujudkan Program dan Kegiatan Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara, sehingga memberikan kontribusi bagi perwujudan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 – 2021.
3. Sebagai landasan penentuan program dan kegiatan tahunan yang berkelanjutan untuk tahun 2020 - 2021.
4. Menetapkan dan menginformasikan tujuan, sasaran, target kinerja, kebijakan, strategi, program, dan kegiatan pembangunan sub sektor Pertanian dan Peternakan tahun 2016 – 2021.
5. Mengarahkan pembangunan jangka menengah sub sektor Pertanian dan Peternakan.

1.4 Sistematika Penulisan

Revisi Rencana Strategi Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 – 2021, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- Bab I.** Pendahuluan, berisi tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, Sistematika Penulisan.
- Bab II.** Gambaran Pelayanan Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara, berisi Gambaran Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Bab III.** Permasalahan dan Isu-isu Strategis, berisi identifikasi permasalahan berdasarkan tugas, fungsi pelayanan OPD; Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih; telaah Renstra K/L; Telaah RTRW serta Penentuan Isu-Isu Strategi.
- Bab IV.** Tujuan dan Sasaran, berisi uraian tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara beserta indicator setiap tujuan/sasaran tersebut.
- Bab V.** Strategi dan Arah Kebijakan, berisi rumusan strategi dan arah kebijakan Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam 5 (lima) tahun mendatang.
- Bab VI.** Rencana Program dan Kegiatan Beserta Pendanaan, berisi uraian tentang rencana kerja dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.
- Bab VII.** Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan, berisi uraian tentang indicator kinerja Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.
- Bab VIII.** Penutup, berisi uraian tentang catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD

Dinas Pertanian dan Peternakan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Kedudukan Dinas Pertanian dan Peternakan adalah merupakan unsur perangkat daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tugas pokok melaksanakan kewenangan urusan otonomi daerah di bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura, dengan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis operasional di bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura.
- b. Pelaksanaan kebijakan operasional, pemberian bimbingan, dan pembinaan di sub sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura
- c. Pelaksanaan pelayanan umum sesuai lingkup tugasnya.
- d. **Pembinaan 22UPTD (UnitPelaksana Teknis Dinas)** baik di level kecamatan maupun BalaiBenihPembantu di sub sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura yang tersebar di 18 kecamatan.

Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara terdiri dari Kepala Dinas, Sekretaris, 4 (empat) Kepala Bidang, 12 (dua belas) Kepala Seksi, 3 (tiga) Kepala Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional dengan tugas pokok masing – masing sebagai berikut :

2.1.1 Sekretariat

Melaksanakan perencanaan, mengkoordinasikan, merumuskan, mengendalikan urusan serta memberikan pelayanan administrasi kepada semua unsur Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, termasuk urusan kepegawaian, keuangan, perundang – undangan, surat menyurat, penyusunan program, monitoring dan evaluasi, pendataan, dan pelaporan.

Dalam melaksanakan fungsi dan peranannya dibantu oleh :

- a. Sub Bagian Penyusunan Program dan keuangan
- b. Sub Bagian Umum dan Ketatalaksanaan
- c. Sub Bagian Kepegawaian

2.1.2 Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian

Melaksanakan, memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan, mengawasi serta mengkonsultasikan perencanaan, bimbingan teknis dan pengendalian dalam urusan pengembangan sarana dan pertanian sebagai penunjang peningkatan produktivitas dan produksi hasil pertanian tanaman pangan dan hortikultura.

Dalam menjalankan fungsi dan perannya dibantu oleh :

- a. Seksi Pengolahan Lahan dan Air
- b. Seksi Pestisida dan Sarana Usaha
- c. Seksi Alat dan Mesin Pertanian

2.1.3 Bidang Produksi Tanaman Pangan

Melaksanakan perencanaan, mengkoordinasikan, bimbingan teknis dan pengendalian dalam urusan bidang pengembangan tanaman padi dan palawija dalam rangka

peningkatan produktivitas dan produksi pertanian tanaman pangan (Padi dan Palawija).

Dalam melaksanakan fungsi dan perannya dibantu oleh :

- a. Seksi **Produksi Padi dan Serealia**
- b. **Seksi Produksi Palawija**
- c. **Seksi Perbenihan Tanaman Pangan**

2.1.4 Bidang Produksi Hortikultura

Melaksanakan perencanaan, mengkoordinasikan, bimbingan teknis dan pengendalian dalam urusan bidang pengembangan tanaman hortikultura dalam rangka peningkatan produktivitas dan produksi hortikultura (Sayuran, Buah-Buahan, Tanaman Hias, dan Bio Farmaka)

Dalam melaksanakan fungsi dan perannya dibantu :

- a. Seksi Produksi Buah - Buah
- b. Seksi Produksi Sayuran, Tanaman Hias, dan Biofarmaka
- c. Seksi Perbenihan Tanaman Hortikultura

2.1.5 Bidang Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Pertanian

Melaksanakan perencanaan, mengkoordinasikan, bimbingan teknis dan pengendalian dalam urusan peningkatan mutu hasil, penyebar luasan penerapan dan pemantauan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil, promosi, informasi pasar dan pengawasan harga serta pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura.

Dalam melaksanakan fungsi dan perannya dibantu oleh :

- a. Seksi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil
- b. Seksi Pembinaan Usaha Kemitraan
- c. Seksi Pemasaran

2.1.6 Unit Pelaksana Teknis Dinas(UPTD) Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kecamatan.

Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian dan Peternakan yang tersebar di 18 Kecamatan dengan tugas pokoknya adalah melaksanakan perencanaan, mengkoordinasikan, bimbingan teknis dan pembinaan pembangunan pertanian di tingkat Kecamatan masing – masing.

UPTD Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kecamatan dikepalai oleh Kepala UPTD yang dibantu oleh Kepala Tata Usaha di bidang Administrasi dan Teknis Perkantoran yang membawahi beberapa staf administrasi dan teknis fungsional. Dalam pelaksanaan tugasnya UPTD Pertanian Kecamatan juga berkoordinasi dengan Camat, Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan serta UPTD Dinas Lingkup Pertanian Kecamatan.

2.1.7 Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Balai Benih Pembantu

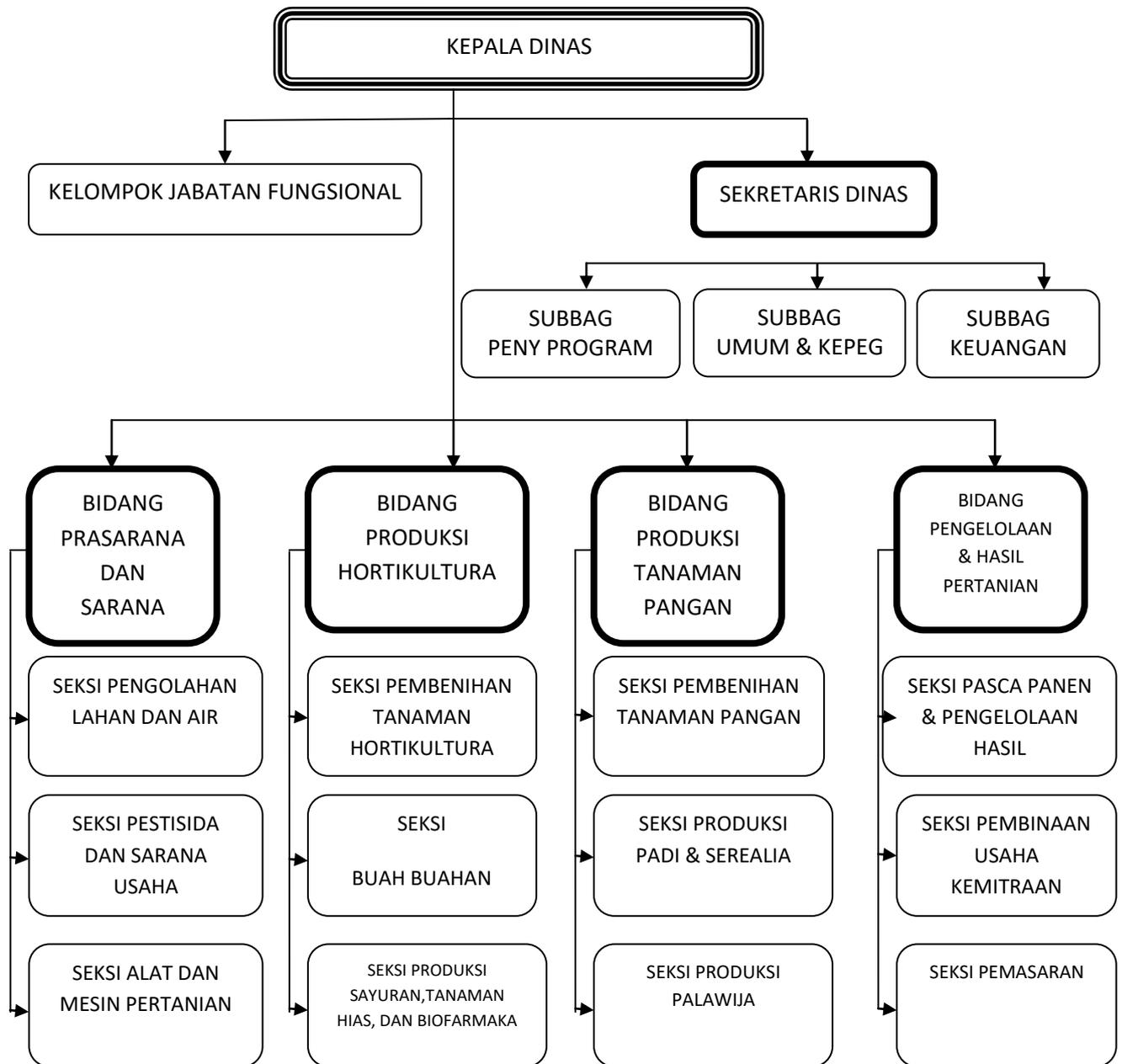
UPTD Balai Benih Pembantu (BBP) Dinas Pertanian Tanaman Pangan saat ini tersebar di beberapa Kecamatan yaitu :

- a. UPTD Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Balai Benih Pembantu (BBP) Padi di Kecamatan Sebulu.
- b. UPTD Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Balai Benih Pembantu (BBP) Palawija di Kecamatan Loa Kulu
- c. UPTD Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Balai Benih Pembantu (BBP) Hortikultura di Kecamatan Tenggarong

d. UPTD Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura di Kecamatan Tenggarong.

UPTD Balai Benih Pembantu (BBP) tersebut di atas mempunyai tugas pokok sebagai penyedia benih / bibit unggul Nasional yang akan disebar ke tingkat petani. Sedangkan UPTD Balai Proteksi melaksanakan tugas pengembangan teknologi dan pengendalian hama dan penyakit tanaman pangan dan hortikultura.

UPTD Balai Benih Pembantu (BBP) dan Balai Proteksi dikepalai oleh Kepala UPTD yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Kepala Tata Usaha di bidang Administrasi dan Teknis Perkantoran, yang membawahi beberapa staf administrasi dan teknis fungsional.



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara

2.2 Sumber Daya SKPD

Keadaan pegawai Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan tingkat Pendidikan

pada Tahun 2015 secara keseluruhan berjumlah 246 orang. Adapun data-data pegawai sebagai berikut :

Tabel 2.1 Jumlah ASN Pegawai Dinas Pertanian dan Peternakan Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2015

Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
S3	-	-	-
S2	12	5	17
S1	64	52	116
Diploma III	10	2	12
Diploma II	-	-	-
Diploma I	-	-	-
SLTA	67	30	97
SLTP	3	-	3
SD	1	-	1
Jumlah	157	89	246

Sumber: Daftar Urutan Kepangkatan (DUK) DPTH, 2015

Tabel 2.2 Jabatan dan Jumlah ASN Pegawai Dinas Pertanian dan Peternakan Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2015

A	Jabatan	Formasi Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
			Laki-Laki	Perempuan	
	Pejabat Struktural				
	Kepala (Eselon II/b)		1	-	1
	Sekretaris (Eselon III/a)		1	-	1
	Kepala Bidang (Eselon III/b)		4	-	4
	Kepala Sub Bagian (Eselon		3	-	3

Jabatan	Formasi Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
IV/a)				
Kepala Seksi (Eselon IV/a)		9	3	12
Kepala UPTD Kecamatan (Eselon IV/a)		20	2	22
Kepala TU UPT Kecamatan (Eselon IV/b)		9	5	14
B Jabatan Fungsional Tertentu		-	-	-
Perencana Muda		1	-	1
Perencana Pertama		1	-	1
C Fungsional Umum		114	79	193
Jumlah		157	89	246

Sumber: Daftar Urutan Kepangkatan (DUK) DPTH, 2015

Tabel 2.3 **Jumlah ASN** Pegawai Dinas Pertanian dan Peternakan **Berdasarkan Pangkat Golongan Tahun 2015**

Pangkat/Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
Pembina Utama Muda (IV/c)	1	-	1
Pembina Tk. I (IV/b)	3	-	3
Pembina (IV/a)	5	2	7
Penata Tk. I (III/d)	21	8	29
Penata (III/c)	20	10	30
Penata Muda Tk. I (III/b)	23	31	54

Penata Muda (III/a)	5	3	8
Pengatur Tk. I (II/d)	11	3	14
Pengatur (II/c)	34	15	49
Pengatur Muda Tk. I (II/b)	27	17	44
Pengatur Muda (II/a)	3	-	3
Juru Tk. I (I/d)	1	-	1
Juru Muda Tk. I (I/c)	3	-	3
Jumlah	157	89	<u>246</u>

Sumber: Daftar Urutan Kepangkatan (DUK) DPTH, 2015

Tabel 2.4 Keadaan Pegawai sampai dengan 30 Desember 2015

DINAS/UPTD	STRUKTURAL	STAF PELAKSANA	PTT/THL	TOTAL
Dinas Kab.	21	93	34	145
UPTD Tenggarong	2	6	3	11
UPTD Tenggarong Seberang	2	4	1	7
UPTD Loa Kulu	1	17	6	24
UPTD Loa Janan	2	7	5	14
UPTD Sanga Sanga	2	2	1	5
UPTD Muara Jawa	1	2	1	4
UPTD Samboja	2	6	1	9
UPTD Anggana	2	9	3	14
UPTD Muara Badak	2	3	-	5
UPTD Marang Kayu	1	5	-	6
UPTD Sebulu	2	5	1	8
UPTD Muara Kaman	1	3	-	4
UPTD Kota Bangun	2	3	5	10
UPTD Muara Wis	1	1	4	6
UPTD Muara Muntai	1	8	5	14
UPTD Kenohan	1	1	1	3
UPTD Kembang Janggut	1	1	1	3
UPTD Tabang	1	3	1	5
UPTD BBP Padi Sebulu	1	1	-	2
UPTD BBP Palawija Loa Kulu	1	6	3	10
UPTD BBP Hortikultura Tenggarong	1	4	-	5

UPTD Balai Proteksi Tanaman Tenggarong	2	3	-	5
JUMLAH	53	193	76	<u>322</u>

Sumber: Daftar Urutan Kepangkatan (DUK) DPTH, 2015

Berdasarkan analisis beban kerja yang diemban oleh Dinas Pertanian dan Peternakan, jika dibandingkan dengan jumlah aparatur, maka jumlah tersebut cukup memadai. Namun dari segi kualitas sumber daya masih perlu ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan formal.

Adapun prasarana dan sarana yang dimiliki Dinas Pertanian dan Peternakan untuk mendukung kegiatan kedinasan baik yang bersifat teknis maupun non teknis terdiri dari :

1. Tanah

Tanah yang dimiliki Dinas Pertanian dan Peternakan terdiri dari 26 unit meliputi tanah untuk gedung dan bangunan serta tanah untuk kebun Dinas.

2. Peralatan dan mesin

Peralatan dan mesin dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan kedinasan baik yang ada di Dinas Kabupaten maupun yang ada di UPTD serta masyarakat.

3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan yang dimiliki Dinas Pertanian dan Peternakan terdiri dari Gedung dan Bangunan untuk Kantor Dinas Kabupaten, UPTD serta Bangunan lainnya yang ada di masyarakat.

4. Jalan dan Jaringan

Jalan dan Jaringan Irigasi yang pernah dibangun oleh Dinas Pertanian dan Peternakan tersebar di beberapa Kecamatan sebagai sarana untuk transportasi masyarakat menuju lahan

persawahan serta sebagai sarana untuk melakukan pengairan terhadap sawah petani.

5. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya ini merupakan aset diluar empat aset sebelumnya seperti Sapi dimanfaatkan kotorannya sebagai bahan baku pembuatan Kompos, Buku-Buku serta yang lainnya.

Keadaan sarana dan prasarana selengkapnya sebagaimana disajikan pada tabel 2.5.

Tabel 2.5 Keadaan Prasarana dan Sarana Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara sampai 31 Desember Tahun 2015

NO	JENIS SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Hutan Untuk Penggunaan Khusus Lainnya	1 Unit	
2	Tanah Bangunan Perumahan Lain-lain	1 Unit	
3	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	23 Unit	
4	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya	1 Unit	
5	Crawler Tractor	54 Unit	
6	Tractor Lain-lain	5 Unit	
7	Portable Generating Set	5 Unit	
8	Transportable Water Pump	5 Unit	
9	Portable Water Pump	6 Unit	
10	Stationary Water Pump	2 Unit	
11	Staion Wagon	5 Unit	
12	Kendaraan Dinas Bermotor Lain-lain	4 Unit	
13	Kendaraan Dinas Esselon III	1 Unit	
14	Pick Up	5 Unit	
15	Sepeda Motor	194 Unit	
16	Kendaraan Bermotor Beroda Dua Lain-lain	1 Unit	
17	Gerobak Dorong	21 Unit	
18	Angkutan Barang Lain-lain	1 Unit	
19	Alat Angkut Apung Motor Brg Lain-lain	1 Unit	

20	Klotok	16 Unit	
21	Alat Angkut Apung Tak Bermotor Lain-lain	1 Unit	
22	Battery Charger	10 Unit	
23	Steam Cleaner	1 Unit	
24	Tripot	4 Unit	
25	Global Positioning System	25 Unit	
26	Scanner	2 Unit	
27	Air Conditioning Unit	27 Unit	
28	Timbangan	4 Unit	
29	Traktor Tangan dengn peralatannya	65 Unit	
30	Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman Lain-lain	5 Unit	
31	Alat Panen/Pengolahan Lain-lain	27 Unit	
32	Alat Penggilingan Padi	1 Unit	
33	Penyemprot Mesin (Power Spayer)	2 Unit	
34	Penyemprot Tangan (Hand Sprayer)	193 Unit	
35	Alat Pemeliharaan Tanaman Lain-lain	24 Unit	
36	Alat Perontok (Theresar Pedal)	20 Unit	
37	Alat Perontok Mesin (Power Theresar)	36 Unit	
38	Alat Panen Lain-lain	4 Unit	
39	Alat Penyimpanan Lain-lain	1 Unit	
40	Mesin Ketik Manual Standar (14-16)	7 Unit	
41	Mesin Ketik Manual Longewagen (18)	27 Unit	
42	Mesin Ketik Listrik Portable	1 Unit	
43	Mesin Ketik Lain-lain	18 Unit	
44	Mesin Hitung Manual	15 Unit	
45	Mesin Hitung Elektronik	20 Unit	
46	Mesin Absen (Time Recorder)	28 Unit	
47	Mesin Calculator	50 Unit	
48	Mesin Penghitung Uang	2 Unit	
49	Mesin Hitung/Jumlah Lain-lain	2 Unit	
50	Mesin Stensil Listrik Folio	25 Unit	
51	Lemari Besi	4 Unit	
52	Rak Besi/Metal	2 Unit	
53	Rak Kayu	8 Unit	
54	Filling Besi/Metal	9 Unit	
55	Filling Kayu	2 Unit	
56	Lemari Kaca	17 Unit	
57	Lemari Makan	2 Unit	
58	Alat Penghancur Kertas	8 Unit	
59	Papan Nama Instansi	22 Unit	
60	Papan Pengumuman	27 Unit	
61	Papan Tulis	2 Unit	

62	White Board	26 Unit	
63	Alat Pemotong Kertas	1 Unit	
64	Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	416 Unit	
65	Partisi	1 Unit	
66	Lemari Kayu	37 Unit	
67	Rak Kayu	1 Unit	
68	Meja Kayu/Rotan	22 Unit	
69	Kursi Besi/Metal	1 Unit	
70	Kursi Kayu/Rotan/Bambu	1 Unit	
71	Meja Rapat	7 Unit	
72	Meja Podium	1 Unit	
73	Kursi Rapat	14 Unit	
74	Kursi Tamu	1 Unit	
75	Kursi Putar	11 Unit	
76	Meja Piket	1 Unit	
77	Tenda	2 Unit	
78	Meja Biro	2 Unit	
79	Sofa	11 Unit	
80	MOUBILER LAINNYA	1 Unit	
81	Jam Mekanis	2 Unit	
82	Jam Elektronik	2 Unit	
83	Mesin Penghisap Debu	1 Unit	
84	Mesin Potong Rumput	17 Unit	
85	Lemari Es	1 Unit	
86	AC Unit	4 Unit	
87	AC Split	1 Unit	
88	Kipas Angin	22 Unit	
89	Kompor Gas	1 Unit	
90	Tabung Gas	2 Unit	
91	Alat Dapur Lain-lain	1 Unit	
92	Radio	3 Unit	
93	Televisi	3 Unit	
94	Sound System	3 Unit	
95	Wireless	20 Unit	
96	Microphone	8 Unit	
97	Microphone Floor Stand	4 Unit	
98	Microphone Table Stand	1 Unit	
99	Unit Power Supply	9 Unit	
100	Camera Video	5 Unit	
101	Tustel	12 Unit	
102	Gambar Presiden/Wakil Presiden	30 Unit	
103	Tiang Bendera	1 Unit	

104	Tangga Alumunium	2 Unit	
105	Dispenser	6 Unit	
106	Handy Cam	5 Unit	
107	Alat Rumah Tangga Lain-lain	684 Unit	
108	Alat Pemadam Portable	1 Unit	
109	Alat Pembantu Pemadam Kebakaran	6 Unit	
110	CCTV	1 Unit	
111	P.C Unit	52 Unit	
112	Lap Top	95 Unit	
113	Note Book	65 Unit	
114	Personal Komputer Lain-lain	9 Unit	
115	Plotter	1 Unit	
116	Hard Disk	29 Unit	
117	Printer	125 Unit	
118	Peralatan Mini Komputer Lain-lain	1 Unit	
119	CPU	8 Unit	
120	Monitor	11 Unit	
121	Scanner	1 Unit	
122	External	12 Unit	
123	Peralatan Personal Komputer Lain-lain	10 Unit	
124	Server	1 Unit	
125	Router	5 Unit	
126	Peralatan Jaringan Lain-lain	1 Unit	
127	Meja Kerja Pejabat Eselon III	4 Unit	
128	Meja Kerja Pejabat Eselon III	10 Unit	
129	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	22 Unit	
130	Meja Kerja Pejabat Eselon V	1 Unit	
131	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	175 Unit	
132	Meja Kerja Pejabat Lain-lain	11 Unit	
133	Meja Tamu Ruangan Tunggu Pejabat Eselon III	2 Unit	
134	Meja Rapat Pejabat Lain-lain	1 Unit	
135	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	5 Unit	
136	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1 Unit	
137	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1 Unit	
138	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	1 Unit	
139	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	5 Unit	
140	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	5 Unit	
141	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	1 Unit	
142	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	10 Unit	
143	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	25 Unit	
144	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	295 Unit	
145	Kursi Kerja Pejabat Lain-lain	297 Unit	

146	Kursi Rapat Pejabat Eselon II	45 Unit	
147	Kursi Rapat Pejabat Lain-lain	2 Unit	
148	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	37 Unit	
149	Lemari dan Arsip Pejabat Lain-lain	6 Unit	
150	Camera + Attachment	2 Unit	
151	Proyektor + Attachment	9 Unit	
152	Audio Amplifier	3 Unit	
153	Microphone/Wireless Mic	5 Unit	
154	Unintemuptible Power Supply (UPS)	45 Unit	
155	Peralatan studio Visual Lain-lain	3 Unit	
156	Camera Electronic	48 Unit	
157	Alat Pengolah Data	2 Unit	
158	Peralatan Computing Lain-lain	2 Unit	
159	Kompas	1 Unit	
160	Peralatan Pemetaan Ukur Lain-lain	32 Unit	
161	Telephone (PABX)	2 Unit	
162	Pesawat Telephone	17 Unit	
163	Telephone Mobile	1 Unit	
164	Facsimile	3 Unit	
165	Handphone	34 Unit	
166	Alat Komunikasi Lain-lain	2 Unit	
167	Wireless Amplifier	1 Unit	
168	Mesin Potong Jerami	18 Unit	
169	Stabilizer	1 Unit	
170	Evaporator	1 Unit	
171	Kompor Gas	1 Unit	
172	Universal Miling Machine	1 Unit	
173	Mesin Vacum Trocner Dryne	1 Unit	
174	Generator	1 Unit	
175	Grain Moisture Tester	7 Unit	
176	Personal Komputer	62 Unit	
177	Dryer	2 Unit	
178	Meja Kerja	41 Unit	
179	Kabel Listrik (Electrical)	1 Unit	
180	Bendera Merah Putih	25 Unit	
181	Generator Set (Lab Scale)	1 Unit	
182	Vacuum Drying Oven	2 Unit	
183	Bangunan Gedung Kantor Permanen	39 Unit	
184	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	88 Unit	
185	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	3 Unit	
186	Bangunan Gudang Tertutup Semi Permanen	1 Unit	
187	Bangunan Gudang Terbuka Semi Permanen	3 Unit	

188	Bangunan Gudang Lain-lain	3 Unit	
189	Bangunan Gedung Instalasi lain-lain	1 Unit	
190	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	1 Unit	
191	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain	1 Unit	
192	Bangunan Pagar Kantor	1 Unit	
193	Rumah Negara Golongan I Type E Permanen	1 Unit	
194	Rumah Negara Golongan II Type A Permanen	1 Unit	
195	Jalan Desa Lain-lain	10 Unit	
196	Saluran Induk	2 Unit	
197	Bangunan Pembawa Irigasi Lain-lain	2 Unit	
198	Tanggul Banjir	1 Unit	
199	Pintu Air	1 Unit	
200	Bangunan Pengambilan Air Bersih Lain-lain	2 Unit	
201	Bangunan Pembawa Air Bersih Lain-lain	1 Unit	
202	Bangunan Pelengkap Air Bersih Lain-lain	1 Unit	
203	Instalasi Listrik Tenaga Air Lain-lain	2 Unit	
204	Instansi Pusat Pengatur Listrik Lain-lain	1 Unit	
205	Jaringan Pembawa Lain-lain	1 Unit	
206	Jaringan Induk Distribusi Lain-lain	1 Unit	
207	Jaringan Cabang Distribusi lain-lain	1 Unit	
208	Jaringan Distribusi Lain-lain	1 Unit	
209	Jaringan Telepon Di atas Tanah Lain-lain	1 Unit	
210	Buku Umum Lain-lain	1 Unit	
211	Peta Topografi	1 Unit	
212	Sapi	16 Ekor	Mati
JUMLAH		4471	

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

Tugas Dinas Pertanian dan Peternakan sebagai salah satu perangkat daerah yaitu membantu kepala daerah melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura, berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan juga dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta sebagai upaya pencapaian visi dan misi pemerintah daerah Kabupaten

Kutai Kartanegara Dinas Pertanian dan Peternakan selalu berupaya untuk terus meningkatkan kinerjanya sebagai lembaga yang handal dalam semua aspek termasuk penerapan tata kelola pemerintah yang bersih, jujur, dan berwibawa.

Terorganisirnya data dan informasi pembangunan pertanian merupakan salah satu prioritas program ke depan, sehingga Dinas Pertanian dan Peternakan dan pemangku kepentingan lainnya akan lebih mudah untuk mengakses, mencari, dan mengungkapkan data dan informasi sebagai input dalam proses pembangunan sektor terkait lainnya. Dinas Pertanian dan Peternakan akan melakukan segala upaya untuk menjamin produk pertanian tanaman pangan dan hortikultura tidak saja berdaya guna dan berdaya hasil bagi masyarakat, tetapi juga berdaya saing terhadap produk luar.

Adapun gambaran kondisi aktual pencapaian kinerja Dinas Pertanian dan Peternakan disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel. 2.6
Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011-2015

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Renstra SKPD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio (%) Capaian Tahun				
			2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
1	Terwujudnya peningkatan produktivitas hasil pertanian tanaman pangan	Padi :															
2		Padi sawah (Ton)	5,10 3	5,10 4	5,10 9	5,20 1	5,202	5,101	5,101	5,103	5,103	5,113	99,96	99,9 4	99,8 8	98,12	98,2 9
3		Padi Lading (Ton)	3,17 1	3,18 6	3,20 0	3,25 0	3,297	3,182	3,197	3,218	3,224	3,245	100,3 5	100, 35	100. 56	99,20	98,4 2
4		Palawija															
5		Jagung (Ton)	3,19	3,21	3,22	3,24	3,271	3,198	3,238	3,248	3,35	3,752	100,2	100,	100.	103,2	114,

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Renstra SKPD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio (%) Capaian Tahun				
			2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
			0	3	5	5							5	78	71	4	70
6		Kedelai (Ton)	1,48 0	1,49 3	1,50 2	1,51 1	1,523	1,478	1,49	1,493	1,797	1,440	99,86	99,8 0	99.4 0	118.9 3	94,5 5
7		Ubi Kayu (Ton)	14,2 20	16,8 98	18,1 42	19,0 61	20,00 0	14,24	16,92	18,25 3	20,03 4	22,65 2	100,1 4	100, 13	100. 61	105.1 0	113, 26
8		Ubi Jalar (Ton)	10,4 59	10,4 72	10,4 92	10,5 17	10,52 9	10,41 6	10,46 3	10,49 5	10,63 6	10,85 8	99,59	99,9 1	100. 03	101.1 3	103, 12
9		Kacang Tanah (ton)	1,39 2	1,39 5	1,40 8	1,41 7	1,425	1,383	1,394	1,397	1,370	1,327	99,35	99,9 3	99.2 2	96.68	93,1 2

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Renstra SKPD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio (%) Capaian Tahun				
			2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
2.	Terwujudnya peningkatan volume produksi komoditi segar tanaman pangan (padi sawah, padi ladang, jagung, kedelai, kacang tanah, ubi kayu.	Padi :															
	padi sawah (Ton)		196.023	196.800	197.523	197.625	197.975	198.023	188.803	189.393	180.811	173.848	101,02	95,94	95.88	91.49	87,81
	padi ladang (Ton)		15.710	15,852	15.903	16.057	16.198	15.210	13.535	14.353	13.690	12.982	96,82	85,38	90.25	85.26	80,15

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Renstra SKPD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio (%) Capaian Tahun				
			2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
		Palawija :															
		jagung (Ton)	3,623	3,675	3.702	3,715	3.725	2.015	1,881	1.342	834	1,576	55,62	51,18	36.25	22.45	42,31
		kedelai (Ton)	491	516	527	531	549	541	429	551	232	154	110,18	83,14	104.55	43.69	28,05
		ubi kayu (Ton)	20,577	20.717	21.008	22.111	23.440	17.614	15,269	21.027	23.260	21.701	85,60	0,07	100.09	105.20	92,58
		ubi jalar (Ton)	8.564	8.654	8.773	8.846	8.926	6.864	5.954	6.738	6.637	5.299	80,15	68,80	76.80	75.03	59,37
		Kacang Tanah (Ton)	852	861	874	884	891	712	651	686	680	463	83,57	75,61	78.49	76.92	51,96

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Renstra SKPD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio (%) Capaian Tahun					
			2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	
3.	Terwujudnya peningkatan volume produksi komoditi segar tanaman hortikultura (sayur-sayuran, buah-buahan)	Horti kultura :																
		Tanaman Buah (Ton)	51.0 59	57.18 9	58.9 58	61.4 57	62.68 6	53.50 8	57.38 9	61.66 7	80.41 9	65.35 4	104,8 0	100, 35	104,5 9	130,8 5	104,2 6	
		Sayuran (Ton)	22.8 43	22.98 2	23.0 96	23.1 28	23.26 5	18.34 3	20.28 2	26.90 0	36.46 7	36.96 7	80,30	88,2 5	116,4 7	157,6 7	158,9 0	

Sumber: LKjIP Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2016

Tabel. 2.7
Anggaran dan Realisasi Belanja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011-2015

Tahun	Besaran Anggaran	Realisasi	%	% Rata-Rata
2011	26.582.655.166	23.381.271.229	87,96	80.22
2012	30.383.416.206	22.938.639.013	75,50	73.20
2013	51.050.278.704	36.837.851.825	72,16	84.09
2014	23.863.870.000	20.942.293.030	87,76	80,36
2015	16.860.798.608	15.389.894.890	91,28	88,28

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Faktor eksternal adalah faktor yang terdapat / bersumber dari luar lingkungan unit kerja dimana ada yang berupa peluang dan tantangan (ancaman) yang perlu diatasi / dihindari agar sasaran prioritas dapat terwujud.

2.4.1 Peluang (Opportunities = O).

- ❖ UU No. 41 Tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian berkelanjutan
- ❖ Pengembangan pertanian tanaman pangan merupakan skala prioritas dalam program Gerbang Raja II
- ❖ memiliki Potensi peningkatan produksi dan produktivitas pertanian tanaman pangan
- ❖ Peluang pasar dan kemitraan agribisnis cukup besar
- ❖ Tersedia sumberdaya petanisebagai pelaku pembangunan pertanian
- ❖ Adanya program percepatan modernisasi pertanian

2.4.2. Tantangan (Threats = T)

- ❖ Kemampuan petani dalam penerapan paket teknologi masih rendah
- ❖ Infrastruktur & prasarana pengembangan pertanian belum memadai
- ❖ Alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian
- ❖ Dampak perubahan fenomena iklim dan gangguan OPT terhadap peningkatan produksi
- ❖ Kurangnya minat pemuda untuk kegiatan usahatani

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Permasalahan yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pertanian dan Peternakan sangat mempengaruhi pembangunan pertanian tanaman pangan, hortikultura dan peternakan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Permasalahan-permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pelayanan publik di bidang pertanian dan peternakan
2. Kurangnya dukungan anggaran
3. Masih terdapat sebagian pegawai yang belum memiliki komitmen dan etos kerja yang tinggi
4. Sikap mental di sebagian kalangan pegawai belum baik
5. Masih kurangnya kualitas sumber daya manusia aparatur
6. Terdapat sebagian pegawai yang belum memahami tugas dan tanggung jawabnya
7. Sistem insentif yang belum memadai serta disinsentif yang belum berjalan dengan baik
8. Minimnya keikutsertaan pegawai dalam kegiatan pelatihan teknis dan fungsional
9. Masih rendahnya pertumbuhan sub sector tanaman pangan dan hortikultura serta peternakan
10. Produktivitas hasil usaha tani tanaman pangan dan hortikultura belum optimal
11. Luas tanam dan luas panen belum optimal
12. Penanganan panen, pasca panen, pengolahan hasil dan pemasaran hasil belum optimal

13. Masih rendahnya penggunaan benih bermutu oleh petani ditambah dengan sistem pengadaan benih yang belum sesuai dengan musim tanam
14. Penggunaan pupuk dan pestisida oleh petani belum optimal (belum sesuai dosis anjuran)
15. Semakin berkurangnya kualitas lahan
16. Minimnya ketersediaan sumber air irigasi di saat musim kemarau dan masih terbatasnya sistem irigasi pertanian
17. Masih rendahnya pengetahuan dan ketrampilan petani dalam aspek teknologi budidaya tanaman yang baik dan benar, panen, pasca panen dan pengolahan hasil
18. Pendampingan petani oleh PPL belum optimal dalam aspek budidaya yang antara lain disebabkan oleh macetnya regenerasi PPL
19. Masih rendahnya pengetahuan dan ketrampilan tenaga PPL dalam aspek teknologi budidaya
20. Keterbatasan tenaga POPT dan Pengawas mutu benih
21. Terjadinya kegagalan tanam & puso akibat gangguan OPT dan dampak anomali /perubahan iklim serta bencana alam (banjir)
22. Masih terbatasnya ketersediaan alat/mesin pertanian jenis tertentu di tingkat petani
23. Ketersediaan dan kondisi (mutu) jalan pertanian belum memadai
24. Kecenderungan alih fungsi, degradasi dan fragmentasi (penyusutan kepemilikan) lahan
25. Berkurangnya petani & buruh tani serta menurunnya minat generasi muda untuk berkerja/berprofesi di bidang pertanian
26. Keterbatasan modal petani yang disebabkan oleh kesulitan akses ke perbankan serta system agunan yang relative memberatkan

27. Masih kurangnya penggunaan alat/mesin panen, pasca panen dan pengolahan hasil serta masih terbatasnya sarana penunjang pasca panen dan pemasaran hasil
28. Pemasaran produk masih terbatas di tingkat lokal.
29. Masih panjangnya rantai pemasaran produk
30. Harga komoditi pertanian dan peternakan fluktuatif
31. Kurang dikuasainya informasi pemasaran produk oleh petani/pelaku dan petugas/PPL
32. Kelembagaan petani yang belum mempunyai posisi tawar yang kuat
33. Cakupan dan intensitas pembinaan dan pendampingan kegiatan lapangan belum optimal
34. Belum tersajinya data dan informasi pertanian berbasis online secara memadai
35. Jalinan kerjasama kemitraan dan keterkaitan usaha internal sub sektor maupun eksternal (dengan sub sektor/ sektor lainnya) masih lemah.

Dari hasil identifikasi permasalahan tersebut di atas, selanjutnya diidentifikasi masalah pokok, masalah spesifik dan akar masalah. Masalah pokok merupakan masalah yang bersifat makro bagi perangkat daerah yang terkait dengan tujuan dan sasaran RPJMD, yang dipecahkan melalui rumusan tujuan dan sasaran Renstra. Masalah pokok selanjutnya dijabarkan kedalam rumusan masalah yang lebih spesifik, yaitu penyebab dari setiap masalah pokok tersebut, yang pemecahannya melalui rumusan strategi dalam Renstra. Selanjutnya dari tiap-tiap rumusan masalah yang lebih spesifik tersebut dicari akar masalahnya yang lebih rinci atau beberapa penyebabnya, yang dipecahkan melalui rumusan arah kebijakan dalam Renstra.

Identifikasi masalah pokok, masalah spesifik (rumusan masalah) dan akar masalah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.1. Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara.

No. (1)	Masalah Pokok (2)	Masalah (3)	Akar Masalah (4)
1.	Belum optimalnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pelayanan publik di bidang pertanian dan peternakan	1. Masih terdapat sebagian pegawai yang belum memiliki komitmen dan etos kerja yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta dalam memberikan pelayanan yang prima	36. Sikap mental di sebagian kalangan pegawai belum baik 37. Terdapat sebagian pegawai yang belum memahami tugas dan tanggung jawabnya 38. Sistem insentif (reward) yang belum memadai serta diinsentif (punishment) yang belum berjalan dengan baik
		2. Masih kurangnya kualitas pegawai	1. Sistem penempatan dan rekrutmen pegawai yang belum tepat 2. Minimnya keikutsertaan pegawai dalam diklat
		3. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman pegawai terhadap peraturan yang terkait	3. Kurangnya keikutsertaan pegawai dalam kegiatan sosialisasi peraturan yang terkait dengan pelayanan publik
2	Masih rendahnya pertumbuhan sub sector tanaman pangan dan hortikultura serta peternakan	1. Produktivitas hasil usaha tani tanaman pangan dan hortikultura belum optimal	1. Masih rendahnya penggunaan benih bermutu oleh petani 2. Sistem pengadaan benih yang belum sesuai dengan musim tanam 3. Penggunaan pupuk dan pestisida oleh petani belum optimal (belum sesuai dosis anjuran) 4. Semakin berkurangnya kualitas lahan 5. Minimnya ketersediaan sumber air irigasi di saat musim kemarau dan masih terbatasnya sistem irigasi pertanian 6. Masih rendahnya pengetahuan dan ketrampilan petani dalam aspek teknologi budidaya

			<p>tanaman yang baik dan benar</p> <p>7. Pendampingan petani oleh PPL belum optimal dalam aspek budidaya yang antara lain disebabkan oleh macetnya regenerasi PPL</p> <p>8. Masih rendahnya pengetahuan dan ketrampilan tenaga PPL dalam aspek teknologi budidaya</p> <p>9. Keterbatasan tenaga POPT dan Pengawas mutu benih</p>
		2. Luas tanam dan luas panen belum optimal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Minimnya ketersediaan sumber air irigasi di saat musim kemarau dan masih terbatasnya sistem irigasi pertanian 2. Terjadinya kegagalan tanam & puso akibat gangguan OPT dan dampak anomali / perubahan iklim serta bencana alam (banjir) 3. Masih terbatasnya ketersediaan alat/mesin pertanian jenis tertentu di tingkat petani 4. Ketersediaan dan kondisi (mutu) jalan pertanian belum memadai 5. Kecenderungan alih fungsi, degradasi dan fragmentasi (penyusutan kepemilikan) lahan 6. Berkurangnya petani & buruh tani serta menurunnya minat generasi muda untuk berkerja/berprofesi di bidang pertanian 7. Keterbatasan modal petani yang disebabkan oleh kesulitan akses ke perbankan serta system agunan yang relative memberatkan
		3. Penanganan panen, pasca panen, pengolahan hasil dan pemasaran hasil belum optimal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih terbatasnya pengetahuan dan ketrampilan petani dalam aspek teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil 2. Masih kurangnya

			penggunaan alat/mesin panen, pasca panen dan pengolahan hasil 3. Masih terbatasnya sarana penunjang pasca panen dan pemasaran hasil 4. Panjangnya rantai tata niaga hasil pertanian 5. Harga komoditi hasil pertanian dan peternakan fluktuatif 6. Kurang dikuasainya informasi pemasaran produk oleh petani/pelaku dan petugas/PPL 7. Kelembagaan petani yang belum mempunyai posisi tawar yang kuat
		4. Ternak.....	1. Belum terbangunnya system perbibitan ternak yang memadai 2.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih

Dalam mewujudkan amanat konstitusi KDH dan wakil KDH terpilih pada periode pemerintah 2016-2021, secara moral dan material akan melanjutkan pembangunan Kutai Kartanegara dengan mengangkat konsep pembangunan “**Gerakan Pembangunan Rakyat Sejahtera (GERBANGRAJA)**”, dengan titik berat mengangkat harkat dan martabat masyarakat Kutai Kartanegara yang direfleksikan dalam semangat/spirit **HARUS** (Hak Rakyat Untuk Sejahtera). Spirit ini memuat program-program pembangunan yang diperuntukan bagi upaya untuk mewujudkan masyarakat Kutai Kartanegara sejahtera dan berkeadilan. Komitmen ini akan mewujudkan dengan **Visi** : “**Kutai Kartanegara Maju, Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan**”

Visi Kutai Kartanegara 2016-2021 tersebut didasari pada upaya pencapaian pembangunan daerah yang inklusif, berorientasi pada 3 (tiga) hal pokok yakni **pertumbuhan, pemerataan** dan **keberlanjutan**, yang dilakukan dengan mengoptimalkan segenap sumber daya yang dimiliki (potensi daerah) didasarkan atas prinsip keterpaduan antara pendekatan sektoral dan kewilayahan. Berikut diagram *Paradigma Gerbang Raja 2016 2021* :



Gambar 3.1 Diagram *Paradigma Gerbang Raja 2016 2021*

Adapun parameter visi Gerbang Raja II adalah :

Maju:

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita masyarakat didukung tingkat pendidikan dan keterampilan masyarakat yang tinggi, dengan tingkat kemiskinan dan pengangguran rendah yang diikuti AKB dan AKI serta Angka buta huruf yang rendah. Semakin efektifnya pelaksanaan pemerintahan yang bersih dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatnya pelayanan publik yang responsive dan berkualitas.

Mandiri :

*Kemampuan dalam mendayagunakan segenap potensi sumberdaya yang dimiliki (ekonomi, sosial, budaya, sumberdaya alam dan energi) **berbasis kearifan lokal** dan menurunnya disparitas pembangunan*

antar wilayah serta tetap terjaganya kelestarian alam dan lingkungan hidup.

Sejahtera :

Terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat (sandang, pangan dan papan) yang layak dan bermartabat, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, serta dalam suasana yang aman dan damai.

Berkeadilan :

Pembangunan yang adil dan merata, tanpa diskriminasi baik antarindividu, golongan maupun antar wilayah yang tersebar di kecamatan, desa/kelurahan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan. Terwujudnya penegakan hukum dan keadilan gender serta perlindungan anak.

Parameter kemajuan, kemandirian dan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan tercermin dalam seluruh aspek kehidupan; dalam pranata dan nilai-nilai, yang melandasi kehidupan politik, ekonomi, dan sosial budaya serta masyarakat yang agamis.

Misi :

Gerbang Raja adalah *Gerbang Kejayaan Kutai Kartanegara* menuju “*percepatan kemajuan*” yang akan dipersembahkan kepada masyarakat Kutai Kartanegara, dengan **Misi** yang dijalankan sebagai berikut :

1. Memantapkan reformasi birokrasi untuk rakyat;
2. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkompeten;
3. Meningkatkan pembiayaan pembangunan daerah;
4. Meningkatkan pengelolaan pertanian dan pariwisata untuk percepatan transformasi struktur ekonomi daerah;
5. Meningkatkan keterpaduan pembangunan infrastruktur menuju daya saing daerah;
6. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
7. Meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan serta penguatan perlindungan anak;

GERBANG RAJA menjadi tekad bersama masyarakat Kutai Kartanegara untuk maju, mandiri, sejahtera dan berkeadilan. Oleh karena itu, segenap daya upaya dan potensi sumberdaya yang ada harus kita kerahkan mensukseskan program tersebut, **untuk**

menghantarkan Rakyat KutaiKartanegara menuju Kejayaan Kutai Kartanegara 2016 - 2021.

Program Unggulan Gerbang Raja II yang terkait dengan Dinas Pertanian tanaman pangan, hortikultura dan peternakan yaitu:

1. **Misi 2:** Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkompeten

Target Misi 2:

1. *Indeks Pembangunan Manusia meningkat*
2. *Jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan menurun*
3. *Pengangguran Menurun*

Dengan fokus utama:

“Nebas Tapak Kemiskinan”, merupakan upaya mengurangi tingkat kemiskinan yang tercatat dalam *Album Kemiskinan* yang akan memuat jumlah penduduk miskin, profil kemiskinan dan penyebab kemiskinan. Yang akan dilakukan untuk mengurangi tingkat kemiskinan di Kutai Kartanegara melalui Dinas Pertanian dan Peternakan adalah program: **Permodalan Petani Rp. 100 juta per kelompok tani (sarana untuk membantu masyarakat tani miskin yang membutuhkan modal usaha);**

2. **Misi 4:** Meningkatkan pengelolaan pertanian dan pariwisata untuk percepatan transformasi struktur ekonomi daerah

Target Misi 4:

1. *Pertumbuhan sektor pertanian meningkat*
2. *Kunjungan wisata meningkat*
3. *Pertumbuhan Ekonomi Non Migas dan Non Batu Bara Meningkat*
4. *Tersedianya kawasan-kawasan strategis pertanian dan pariwisata*
5. *Pertumbuhan Industri pengolahan pertanian meningkat*

Fokus kedepan adalah *Peningkatan pertanian* sebagai berikut :

1. Politik Anggaran Sektor Pertanian;

Dialokasikan dana minimal 10% dalam mendukung “5 PILAR PEMBANGUNAN PERTANIAN” yaitu : (1) Optimalisasi sumber daya lahan dan air; (2) Pemandirian proses produksi dan infrastruktur, (3) Jaringan dan Kelembagaan Petani; (4) Pembudayaan pola konsumsi pangan lokal; (5) Inovasi teknologi, alat dan mesin pertanian.

2. Revolusi Jagung;

Akan dilakukan perubahan yang cepat dan mendasar guna mewujudkan **Revolusi Jagung**, yang merupakan upaya kongkrit untuk menempatkan kembali pembangunan pertanian (Tanaman Pangan) sebagai salah satu sektor andalan pembangunan di Kutai

Kartanegara, dalam hal menyediakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat/petani, mengurangi kemiskinan dan melestarikan lingkungan hidup. **Revolusi Jagung** menggambarkan proses pembangunan dari hulu (produksi) sampai hilir (konsumsi). Akan diwujudkan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

- a. **Revolusi Sistem Produksi** melalui **Mekanisasi Pertanian** mulai dari pengolahan tanah, panen Jagung dengan mekanisasi, dipipil langsung dimasukkan ke *Alat Angkut Agropolitan*. **Penyediaan Benih/Bibit Unggul, dan Pupuk;** benih merupakan sarana utama petani melalui penyediaan benih unggul bersertifikasi. **Pengendalian Hama Penyakit.** untuk mempertahankan potensi produksi yang ingin dicapai dari gangguan organisme pengganggu tanaman (OPT) serta meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan petani dalam pengendalian OPT, tanpa pestisida sehingga munculnya OPT dapat diatasi dengan cepat.
- b. **Revolusi Sistem Distribusi** melalui memperlancar pemasaran dengan jaminan harga dasar melalui BUMDes atau kemitraan dengan lembaga lain (melakukan pembinaan dan koordinasi dengan pengusaha pedagang pengumpul, pedagang besar dalam mempertahankan tingkat harga yang layak untuk petani).
- c. **Menyediakan permodalan** para petani melalui kelompok tani dapat memanfaatkan dana **permodalan petani** dengan mengajukan rencana kebutuhan biaya usaha tani melalui rencana kebutuhan kelompok.
- d. Mempercepat pembangunan infrastruktur irigasi (*termasuk waduk dan embung bekastambang*), jalan usaha tani.
 - 1) Membangun jaringan irigasi untuk mengairi lahan sawah seluas 30.000 ha.
 - 2) Pembukaan lahan pertanian baru seluas 10.000 ha.
 - 3) Mengoptimalkan Balai Penyuluh Pertanian.
- e. Mekanisasi dan modernisasi teknologi pertanian dalam mendukung upaya swasembada pangan;
- f. Mendorong pembangunan industri pengolahan pangan yang berdaya saing;
- g. Membangun demplot peningkatan produksi pertanian rakyat di setiap kecamatan dan budidaya tanaman lokal;
- h. Gerakan Penanaman 70.000 tanaman lokal dalam rangka pelestarian dengan memanfaatkan lahan desa dan sepanjang bahu jalan atau lahan lainnya;

- i. Mengembangkan usaha ekonomi keluarga dan industri rumah tangga;
- j. Mendukung agenda Nawa Cita prioritas kedaulatan pangan, kedaulatan energi, kemaritiman, pariwisata dan industri yang mendukung pengembangan agribisnis dan agroindustri;

3.3 Telaahan Renstra K/L dan RenstraDinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Kaltim

3.3.1. Renstra Kementerian RI (2015 – 2019)

(Nomor : 19/Permentan/HK.140/4/2015)

a. Visi

Terwujudnya Sistem Pertanian-Bioindustri Berkelanjutan yang Menghasilkan Beragam Pangan Sehat dan Produk Bernilai Tambah Tinggi Berbasis Sumberdaya Lokal untuk Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani

b. Misi

- 1) Mewujudkan kedaulatan pangan.
- 2) Mewujudkan sistem pertanian bioindustri berkelanjutan
- 3) Mewujudkan kesejahteraan petani.
- 4) Mewujudkan Reformasi Birokrasi.

c. Tujuan

- 1) Meningkatkan ketersediaan dan diversifikasi untuk mewujudkan kedaulatan pangan.
- 2) Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pangan dan pertanian.
- 3) Meningkatkan ketersediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi.
- 4) Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani.
- 5) Meningkatkan kualitas kinerja aparatur pemerintah bidang pertanian yang amanah dan profesional.

d. Sasaran

- 1) Meningkatkan ketersediaan dan diversifikasi untuk mewujudkan kedaulatan pangan.
 - Swasembada padi, jagung dan kedelai serta peningkatan produksi daging dan gula
 - Peningkatan diversifikasi pangan

- 2) Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pangan dan pertanian.
 - ☑ Peningkatan komoditas bernilai tambah, berdaya saing dalam memenuhi pasar ekspor dan substitusi impor
- 3) Meningkatkan ketersediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi.
 - ☑ Penyediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi
- 4) Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani.
 - ☑ Peningkatan pendapatan keluarga petani
- 5) Meningkatkan kualitas kinerja aparatur pemerintah bidang pertanian yang amanah dan professional
 - ☑ Akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah yang baik

e. Permasalahan

- 1) Lahan
 - Konversi lahan yang tidak terkendali
 - Keterbatasan dalam pencetakan lahan baru
 - Penurunan kualitas lahan
 - Rata-rata kepemilikan lahan yang sempit
 - Ketidakpastian status kepemilikan lahan
- 2) Infrastruktur
 - Kerusakan jaringan irigasi yang tinggi
 - Pendangkalan waduk
 - Kurang memadainya sarana pelabuhan dan transportasi ternak
- 3) Benih
 - Sistem pengadaan benih yang tidak sesuai dengan musim tanam
 - Belum terbangunnya system pembibitan yang memadai
- 4) Regulasi/Kelembagaan
 - Perizinan investasi untuk pengembangan integrasi sawit-sapi
 - Perizinan HGU investasi tanaman pangan yang belum diatur petunjuk pelaksanaannya kecuali untuk tebu
 - Kelembagaan petani yang belum mempunyai posisi tawar yang kuat
- 5) SDM
 - Kemampuan petani, peternak dan pekebun dalam memanfaatkan teknologi maju masih rendah
 - Menurunnya minat generasi muda untuk terjun dibidang pertanian
 - Keterbatasan tenaga penyuluh, pengamat OPT, pengawas benih tanaman, serta tenaga kesehatan hewan
- 6) Permodalan
 - Sulitnya akses petani terhadap permodalan

- Tunggakan kredit usahatani belum terselesaikan
- Persyaratan agunan kredit yang rumit

f. Isu-Isu Strategis (5 Tahun ke depan)

- 1) **Kecukupan produksi** komoditas strategis (padi, jagung, kedelai, tebu, sapi, cabai dan bawang merah) serta pengurangan ketergantungan impor
- 2) Peningkatan **daya saing produk** di dalam negeri /antisipasi pasar bebas AEC (ASEAN *Economic Community* 2015), Indonesia sebagai target pasar.
- 3) **Pemantapan dan peningkatan daya saing** produk pertanian di dunia internasional
- 4) Diversifikasi pangan untuk mengurangi konsumsi beras dan tepung terigu
- 5) Peningkatan pendapatan dan peningkatan kesejahteraan petani

3.3.2. Renstra Dinas Pertanian dan Peternakan Propinsi Kalimantan Timur (2014 – 2018)

Dalam penyusunan rencana strategis (Renstra) Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam mengemban tupoksinya, juga mengacu pada Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Peternakan Propinsi Kalimantan Timur. Adapun berbagai permasalahan pelayanan yang terurai dalam renstra Dinas Pertanian dan Peternakan Propinsi Kalimantan Timur adalah:

1. Kurangnya infrastruktur, sarana dan prasarana pertanian, lahan dan air
2. Menurunnya kesuburan lahan pertanian
3. Keterbatasan akses petani terhadap permodalan dan masih tingginya suku bunga usaha tani
4. Terjadinya alih fungsi dari sub sektor tanaman pangan ke sub sektor lainnya
5. Lemahnya kapasitas dan kelembagaan petani
6. Belum berjalannya diversifikasi tanam dengan baik
7. Peningkatan kualitas SDM pertanian
8. Kondisi infrastruktur jalan ke sentra produksi belum memadai

9. Banyaknya petani yang beralih profesi ke luar sector pertanian
10. Belum padunya antar sector menunjang pembangunan pertanian
11. Kerusakan infrastruktur jaringan irigasi
12. Dampak perubahan iklim

Dalam rangka menuntaskan permasalahan pelayanan dalam Renstra Dinas Pertanian dan Peternakan Propinsi Kalimantan Timur adalah : meningkatkan beberapa langka strategis yang dapat dilakukan, yaitu:

1. Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian tanaman pangan, hortikultura dan peternakan dibeberapa sentra produksi dengan system pertanian yang ramah lingkungan.
2. Peningkatan Kesejahteraan Petani
3. Peningkatan mutu hasil pertanian dengan peningkatan nilai tambah dan daya saing.
4. Kemudahan akses pembiayaan petani dengan suku bunga kecil
5. Penumbuhan dan penguatan kelembagaan usahatani
6. Perbaikan infrastruktur lahan dan air serta perbenihan dan pembibitan
7. Peningkatan kualitas (peran/kompetensi) sumber daya pertanian baik petani maupun petugas lapang.
8. Peningkatan sinergitas antar unit kerja lingkup Dinas Pertanian dan antar sector yang mendukung pembangunan pertanian bai tingkat provinsi maupunkabupaten/kota.

Tabel 3.1
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Tanaman Pangan
Propinsi Kalimantan Timur

VISI: TERWUJUDNYA SWASEMBADA BERAS DAN MENINGKATNYA AGRIBISNIS PERTANIAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN BERBASIS KEUNGGULAN LOKAL									
MISI 1 : Meningkatkan produksi pertanian tanaman pangan, hortikultura dan peternakan									
No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke -					Kondisi Akhir
				2014	2015	2016	2017	2018	
1.	Meningkatkan produksi tanaman pangan dan hortikultura	Meningkatnya produksi padi dan ubi kayu	- Padi	468.818	519.315	566.900	617.200	746.700	746.700
			UbiKayu	58.713	63.688	66.910	70.296	73.853	73.853
		Meningkatnya sarana dan prasarana pertanian	Jumlah lahan yang di optimasi (Ha)	400	550	650	850	1.000	1.000
			Jumlah jalan usaha tani (Km)	33	55	65	75	100	100
			Jumlah pintu air (Unit)	85	118	151	184	209	209
			Jumlah lahan yang di cetak (Ha)	450	700	840	1.100	1.250	1.250
		Meningkatnyamekanisasi pertanian	Jumlah alat dan mesin pertanian (Unit)	135	278	391	504	616	616
		Pengembangan sentra padi	Jumlah kawasan padi (Kawasan)	-	19	35	45	55	55
		Meningkatnya luas tanam ubikayu	Jumlah luas tanam (Ha)	3.031	3.278	3.376	3.478	3.582	3.582
		Meningkatnya produksi durian/lai, jeruk, pepaya, pisang	Jumlah produksi (Ton)						
Durian/Lai	7.336		7.519	7.707	7.900	8.097	8.097		

			Jeruk	4.600	4.715	4.833	4.954	5.077	5.077
			Pisang	101.476	104.012	106.613	109.278	112.010	112.010
			Pepaya	13.394	14.139	14.492	14.855	15.226	15.226
MISI 2: Mewujudkan agribisnis pertanian tanaman pangan, hortikultura dan peternakan									
2.	Meningkatkan pendapatan petani dan kesejahteraan petani	Berkembangnya kawasan usaha agribisnis terpadu (KUAT)	Jumlah kawasan usaha agribisnis terpadu (Demplot)	0	5	8	13	16	16
			Nilai Tukar Petani (NTP)	94,23	96,70	99,50	100,50	107,00	107,00
	Mutu dan daya saing	Meningkatnya jumlah kebun yang di sertifikasi	Jumlah kebun yang teregistrasi (Kebun)	5	20	50	75	150	150
MISI 3: Meningkatkan penanganan pemasaran hasil									
3.	Meningkatkan sarana pasca panen dan pemasaran	Meningkatnya jumlah stasiun terminal agribisnis (STA)	Jumlah STA (Unit)	4	8	12	16	20	20

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kutai Kartanegara (2013 – 2033)

Dalam mengemban Tupoksi Pembangunan Pertanian, Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara harus juga memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Adapun Telaahan Renstra SKPD terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah dapat dilihat dari 9 satuan fisiografi, dengan diskripsi masing-masing satuan sebagaiberikut :

1. Daerah rawa pasang surut (Tidak Swamp)
Adalah daerah dataran di tepi pantai yang selalu di pengaruhi oleh pasangsurut air laut dan ditumbuhi hutan mangrove. Bentuk wilayahnya bermorfologidataran dengan variasi kelerengan kurang dari 2 % dan perbedaan tinggi.
2. Daerah dataran alluvial (Alluvial Plain)
Adalah daerah dataran yang terbentuk dengan proses pengendapan didaerah muara dan lereng-lereng bukit/pegunungan. Bentuk wilayahber morfologi dataran dengan variasi kelerengan kurang dari 2 % danperbedaan tinggi kurang dari 2 meter. Luas satuan dataran alluvial ini adalah 2.251,19 Km² atau 8.62 % dari luas wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Daerah jalur kelokan sungai (Meander Belt),
Adalah daerah jalur meander sungai yang mempunyai tanggul sungai yang lebar. Bentuk wilayah bermorfologi dataran dengan variasi kelerengan kurang dari 2 % dan perbedaaan tinggi kurang dari 2 meter. Luas satuan jalur kelokansungai ini adalah 1.400,93 Km² atau 5,36 % dari luas wilayah KutaiKartanegara.
4. Daerah rawa (Swamp)

Adalah daerah dataran banjir yang selalu tergenang air, rawa bergambut atau dataran banjir berawa di lembah yang sempit. Bentuk wilayah bermorfologi dataran dengan variasi kelerengan kurang dari 2 % dan perbedaan tinggi kurang dari 1 meter. Luas rawa ini adalah 2.691,71 Km² atau 9,87 % dari luas wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

5. Daerah lembah alluvial (Alluvial Valley)

Adalah daerah dataran di lembah atau di kiri-kanan jalan aliran sungai dengan berbukit atau tidak berbukit. Bentuk wilayah bermorfologi dataran dengan variasi kelerengan kurang dari 2 % dan perbedaan tinggi kurang dari 1 meter. Luas satuan lembah alluvial ini adalah 85,03 Km² atau 0,33 % dari luas wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

6. Daerah teras (Terrain)

Adalah daerah berteras, baik yang dipengaruhi laut maupun teras berpasir yang datar dan tertutup gambut yang dangkal atau teras berpasir dengan bentuk wilayah bergelombang. Bentuk wilayah bermorfologi dataran dengan variasi kelerengan kurang dari 8 % dan perbedaan tinggi kurang dari 10 meter. Luas satuan teras ini adalah 880,22 Km² atau 3,37 % dari luas wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

7. Daerah dataran (Plain),

Adalah daerah endapan, dataran karst, dataran vulkanik, dataran batuan beku asam dan dataran basalt. Bentuk wilayah bergelombang sampai berbukit dengan variasi kelerengan kurang dan 2-40 % dan perbedaan tinggi kurang dari 50 meter. Luas satuan dataran ini adalah 8.583, 13 Km² atau 32,86 % dan luas wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

8. Daerah perbukitan (Hill)

Adalah daerah bukit endapan dan ultra basalt, satuan punggung sendimen, metamorf dan vulkanik yang terpotong dengan pola drainase radial. Bentuk wilayah bergelombang sampai agak berbukit. Luas satuan perbukitan ini adalah 4.123,64 Km² atau 15,79 % dari luas wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

9. Daerah pegunungan (Mountain).

Adalah daerah gunung endapan basalt dan ultra basalt, gunung batu pasir dengan lereng terpotong, punggung dan gunung karet yang permukaannya tidak rata, satuan punggung granit dan metamorf dan gunung strato vulkanik yang tererosi dengan pola drainase radial. Bentuk wilayah agak berbukit sampai bergunung dengan variasi kelerengan kurang dari 26 % sampai lebih dari 60 % dan perbedaan tinggi lebih dari 300 meter. Luas satuan pegunungan ini adalah 3.342,31 Km² atau 12,8 % dari luas wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Terdapat beberapa isu-isu strategi penataan ruang Kabupaten Kutai Kartanegara dijabarkan sebagai berikut:

- a) **Pemantapan fungsi dan kedudukan Kabupaten dalam kawasan andalan** dengan strategi meliputi:
 - (1) memantapkan kedudukan Kabupaten sebagai kawasan andalan;
 - (2) memantapkan fungsi Kabupaten sebagai pusat pengembangan **pertanian**, dan pariwisata;
 - (3) menetapkan lokasi pusat pengembangan kegiatan;
 - (4) meningkatkan sarana dan prasarana jaringan jalan dari produsen ke daerah pemasaran, perkotaan ke perdesaan serta antar kota dan antar desa; dan
 - (5) **meningkatkan sarana dan prasarana pendukung** pengembangan kegiatan.
- b) **Pengembangan dan optimalisasi kawasan peruntukan pertanian** dengan strategi meliputi:
 - (1) mengembangkan kawasan peruntukan pertanian;
 - (2) meningkatkan produktivitas, diversifikasi, dan pengolahan hasil pertanian;

- (3) mengembangkan dan mempertahankan lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
 - (4) mengembangkan sistem pemasaran hasil pertanian.
- c) Pengembangan pariwisata berwawasan lingkungan dengan strategi meliputi:
- (1) mengembangkan dan meningkatkan daya tarik wisata sesuai potensinya dengan prinsip pembangunan berkelanjutan;
 - (2) mengembangkan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pariwisata;
 - (3) mengendalikan pengembangan lahan terbangun pada kawasan pariwisata; dan
 - (4) mengembangkan pariwisata dengan keterlibatan masyarakat.
- d) Pengembangan pusat kegiatan yang terkendali dan berwawasan lingkungan dengan strategi meliputi:
- (1) **mendorong pengembangan pusat kegiatan** kawasan perkotaan dan **perdesaan** sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - (2) meningkatkan **sistem prasarana transportasi** kawasan perkotaan dan perdesaan;
 - (3) menyediakan sistem prasarana air bersih kawasan perkotaan dan perdesaan;
 - (4) mempertahankan dan meningkatkan jaringan irigasi untuk ketahanan pangan;
 - (5) meningkatkan ketersediaan energi dan jaringan telekomunikasi; dan
 - (6) meningkatkan ketersediaan sistem prasarana pengelolaan lingkungan.
- e) Peningkatan pengelolaan kawasan lindung dengan strategi meliputi:
- (1) memulihkan secara bertahap kawasan lindung yang telah berubah fungsi;
 - (2) memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
 - (3) mempertahankan permukiman perkotaan dan perdesaan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan
 - (4) Membatasi kegiatan budidaya yang dapat mengganggu fungsi kawasan lindung.
- f) Pengoptimalan potensi lahan budidaya dan sumberdaya alam dengan strategi meliputi:
- (1) meningkatkan prasarana jaringan transportasi;
 - (2) mengembangkan perekonomian pada kawasan budidaya wilayah tertinggal;
 - (3) meningkatkan akses kawasan budidaya ke jaringan jalan arteri dan jalan kolektor;

- (4) mengembangkan sarana dan jaringan prasarana wilayah pendukung; dan
- (5) meningkatkan produktivitas dan komoditas unggulan.**
- g) Pengembangan dan optimalisasi kawasan strategis sesuai penetapannya dengan strategi meliputi:
 - (1) menetapkan kawasan strategis sesuai dengan nilai strategis dan kekhususannya;
 - (2) mengembangkan hasil produksi pada kawasan sentra ekonomi unggulan dan sarana prasarana pendukung perekonomian;
 - (3) membatasi alih fungsi lahan kawasan strategis pada sentra unggulan berbasis potensi pertanian;**
 - (4) melindungi dan melestarikan kawasan dalam mempertahankan karakteristik nilai sosial dan budaya kawasan; dan
 - (5) memanfaatkan kawasan bagi kegiatan dengan nilai ekonomi dan meningkatkan identitas sosial budaya kawasan.
- h) Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara dengan strategi meliputi:
 - (1) mendukung penetapan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan negara;
 - (2) mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif didalam dan disekitar kawasan strategis dengan fungsi pertahanan dan keamanan untuk menjaga fungsi dan peruntukannya;
 - (3) mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan tersebut dengan kawasan budidaya terbangun; dan
 - (4) turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Pelaksanaan tugas, fungsi dan peran Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara tidak terlepas dari dinamika lingkungan strategis baik regional, nasional maupun global, yang ditelaah melalui pendekatan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas fungsi pelayanan SKPD, telaah Visi – Misi – Sasaran Program Gerakan Pengembangan Rakyat Sejahtera II (GERBANG RAJA II) Bupati/Wakil Bupati Kutai Kartanegara terpilih; telaah Rentra R/L dan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi

Kalimantan Timur dan telaah RTRW Kabupaten Kutai Kartanegara, sehingga dapat ditentukan isu-isu strategis sebagai berikut :

3.5.1 Alih Fungsi Lahan Pertanian

Sektor pertanian merupakan sektor yang strategis dan berperan penting dalam perekonomian nasional dan kelangsungan hidup masyarakat, terutama dalam sumbangan terhadap PDB, penyedia lapangan kerja dan penyedia pangan dalam negeri. Kesadaran terhadap peran tersebut menyebabkan sebagian besar masyarakat masih tetap memelihara kegiatan pertanian mereka. Sehubungan dengan itu, pengendalian lahan pertanian merupakan salah satu kebijakan nasional yang strategis untuk tetap memelihara industri pertanian primer dalam kapasitas penyediaan pangan, dalam kaitannya untuk mencegah kerugian sosial ekonomi dalam jangka panjang mengingat sifat multi fungsi dari lahan pertanian.

Perkembangan penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara yang terus meningkat dari tahun ke tahun maka permintaan produk pertanian terutama pangan juga semakin meningkat. Hal ini menimbulkan permasalahan karena kapasitas sumberdaya lahan menurun. Luas lahan pertanian semakin menurun karena pembukaan lahan baru sangat terbatas, banyak petani yang bekerja di luar sektor pertanian (alih profesi) karena memiliki upah kerja yang cukup menjanjikan, adanya eksploitasi lahan yang cukup luas di bidang pertambangan dan perkebunan sehingga terjadi alih fungsi lahan sawah ke non pertanian sehingga mengurangi luas tanam padi sawah. Alih fungsi lahan di Kabupaten Kutai Kartanegara mencapai sebesar 2.145 ha (sumber Dinas Pertanian Kabupaten Kutai Kartanegara, 2015).

3.5.2 Perubahan Iklim dan Tingkat Serangan OPT

Penurunan kualitas lingkungan akan menyebabkan terjadinya perubahan iklim yang berdampak global. Hal ini akan membawa pengaruh terhadap ketersediaan air permukaan maupun air bawah tanah yang cenderung berkurang. Pada sisi lain perubahan iklim juga menyebabkan curah hujan yang tinggi, sehingga terjadi pergeseran musim tanam, munculnya serangan OPT, dan lain sebagainya, yang sudah tentu akan berdampak pada penurunan hasil produksi tanaman yang diusahakan pada tahun berjalan. Menghadapi perubahan iklim dalam kaitan dengan perkembangan hama dan penyakit tanaman diperlukan beberapa langkah yang sesuai. Kajian komprehensif dampak perubahan iklim terhadap hama dan penyakit tanaman perlu dilakukan untuk menentukan langkah yang tepat bagi pemerintah maupun petani. Selain itu diperlukan peningkatan pemahaman agroekosistem oleh petani sehingga lebih cermat mengamati dan menyikapi perubahan yang ada.

3.5.3 Pemasaran Hasil Pertanian Pangan Dan Hortikultura

Sampai saat ini, keuntungan terbesar dari mata rantai tata niaga produk tanaman pangan dinikmati oleh pedagang perantara, sementara petani produsen belum sepenuhnya menikmati hasil penjualan produknya. Hal ini disebabkan posisi tawar petani yang masih relatif rendah karena ketidakmampuan petani kita dalam memasarkan produk yang dihasilkan. Mayoritas petani hanya menjual produknya ke tengkulak dan spekulan oleh tengkulak dan spekulan, kemudian oleh distributor, komoditas tersebut dimainkan sehingga harga kerap melambung di tingkat konsumen.

3.5.4 Akses Permodalan

Usaha pertanian rakyat berskala kecil dan tersebar serta keterbatasan dalam menyediakan agunan mengakibatkan penyerapan pembiayaan usaha kecil dibidang pertanian terutama tanaman pangan relatif rendah. Disisi lain kelembagaan kelompok usahatani yang belum solid serta tingkat pendidikan petani yang relatif rendah juga merupakan faktor pembatas dalam penyusunan proposal dan mengelola administrasi keuangan yang merupakan pra syarat dalam pengajuan pinjaman ke perbankan. Sehingga perlu upaya untuk mendorong keberpihakan pemerintah dan perbankan agar memberikan kredit program dan kredit komersial berbunga rendah. Keterbatasan modal merupakan permasalahan yang paling umum terjadi dalam usaha, terutama bagi usaha kecil seperti usahatani. Ciri khas dari kehidupan petani adalah perbedaan pola penerimaan, pendapatan, dan pengeluarannya. Dalam usahatani permasalahan tersebut menjadi lebih kompleks antara lain karena persyaratan untuk memperoleh kredit formal sulit dipenuhi oleh petani, risiko usahatani yang tinggi, dan adanya tenggang waktu lama untuk menunggu hasil. Masalah utama dalam penyediaan kredit ke petani adalah adanya jurang pemisah antara penyaluran dengan penerimaan kredit. Banyak lembaga permodalan dengan berbagai skim kreditnya ditawarkan ke petani, tetapi pada kenyataannya hanya dapat diakses oleh kelompok masyarakat tertentu sedangkan petani kecil masih tetap kesulitan.

3.5.5 Pengembangan Kawasan Strategis Pertanian tanaman pangan, hortikultura dan peternakan

Kebijakan pengembangan kawasan pertanian untuk memproduksi komoditas unggulan yang berbasis klaster, dimana pendekatan ini dimaksudkan untuk memadukan serangkaian program dan kegiatan pembangunan

pertanian menjadi suatu kesatuan yang utuh baik dalam perspektif system maupun kewilayahan, sehingga dapat mendorong peningkatan daya saing komoditas, wilayah serta pada gilirannya kesejahteraan petani sebagai pelaku usaha tani.

Peraturan Menteri Pertanian No 50 Tahun 2012 merupakan upaya untuk mewujudkan pengembangan komoditas strategis berbasis kawasan secara berkelanjutan yang membutuhkan perencanaan kinerja pengembangan komoditas yang dapat mengakselerasi potensi daya saing komoditas dan wilayah melalui optimalisasi sinergitas pengembangan komoditas (*multiple cropping system* dan *crop livestock system*), keterpaduan lokasi kegiatan dan keterpaduan sumber pembiayaan. Keterpaduan pengembangan komoditas yang didukung secara horisontal dan vertikal oleh segenap pelaku dan pemangku kepentingan dalam suatu hamparan kawasan sentra produksi yang berskala ekonomis mensyaratkan suatu pendekatan yang berbentuk klaster (*cluster*). Mengingat pengembangan komoditas strategis berbasis kawasan masih sangat terbatas walaupun tidak dapat dikatakan masih relatif belum ada, maka pengembangan komoditas strategis berbasis kawasan perlu dilakukan.

3.5.6 Ketersediaan waduk, embung dan jaringan irigasi

Air merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat esensial bagi system produksi pertanian. Air bagi pertanian tidak hanya berkaitan dengan aspek produksi, melainkan juga sangat menentukan potensi perluasan areal tanam (ekstensifikasi), luas areal tanam, intensitas pertanaman (IP), serta kualitas hasil. Pengelolaan sumberdaya air adalah aktivitas perencanaan, pengembangan, distribusi, dan pengaturan agar sumberdaya air digunakan secara optimum dalam memenuhi

berbagai keperluan. Embung dan waduk merupakan bangunan air yang banyak dibangun sebagai salah satu solusi dalam berbagai masalah yang berhubungan dengan sumber daya air, baik pemanfaatan, pengelolaan dan pelestarian. Pembangunan waduk, embung dan jaringan irigasi memang mempunyai manfaat yang banyak bagi masyarakat sesuai peruntukannya. Kondisi saat ini menunjukkan masih terbatasnya jumlah waduk dan embung serta pengelolaan irigasi masih belum optimal.

3.5.7 Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kabupaten Kutai Kartanegara

Produktivitas sektor pertanian dalam arti luas, dengan indikator sasaran Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB cukup tinggi, meskipun Target RPJMD belum sepenuhnya tercapai. Adapun kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB pada tahun 2010 adalah 7,65 triliun rupiah dan pada tahun 2014 meningkat menjadi 11,14 triliun rupiah. Pembangunan pertanian masih jalan ditempat, dan belum bisa meningkatkan kesejahteraan bagi pelaku produksi, seperti petani, pekebun, pembudidaya ikan, peternak dan pelaku lainnya terkait. Kedepan penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan ekonomi daerah berdasarkan pada kekhasan daerah (*endogenous development*) dengan menggunakan potensi sumberdaya manusia, kelembagaan, dan sumberdaya fisik secara lokal (daerah).

3.5.8 Infrastruktur Jalan Usaha Tani

Keberadaan dan berfungsinya infrastruktur jalan usaha tani merupakan prasyarat bagi kelangsungan proses produksi pertanian. Saat ini jaringan jalan produksi dan jalan usaha tani dari dan ke sentra produksi pertanian masih sangat terbatas,

alat dan mesin pertanian kesulitan keluar masuk ke daerah pertanian untuk membawa sarana produksi maupun memasarkan hasil pertanian secara efisien. Peranan infrastruktur Pertanian dalam pembangunan pertanian semakin strategis dan penting, hal ini sangat berkaitan dengan upaya pencapaian sasaran program khususnya program peningkatan nilai tambah. Infrastruktur Pertanian khususnya jalan usaha tani merupakan salah satu komponen dalam subsistem hulu yang diharapkan dapat mendukung subsistem jalan usaha tani, subsistem pengolahan dan subsistem pemasaran hasil pertanian (tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan). Pada saat ini banyak lokasi lahan pertanian belum mempunyai/terdapat jalan usaha tani yang memadai sehingga dapat menghambat masyarakat tani dalam berusaha dilahannya. Dalam UU No. 38 Tahun 2004 tentang jalan terdapat klausul jalan khususnya yaitu jalan yang pembangunan dan pembinaannya merupakan tanggung jawab departemen terkait.

3.5.9 Tingkat Kesejahteraan Petani

Unsur yang berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan petani adalah tingkat pendapatan petani. Nilai pendapatan petani dapat bersumber dari usaha pertaniandan usaha non pertanian. Nilai pendapatan diperoleh dari selisih nilai penjualan komoditas usahatani yang dihasilkan dengan biaya usahatani yang dikeluarkan. Nilai penjualan akan ditentukan oleh volume produksi yang dihasilkan serta harga jual. Hal fundamental yang perlu diupayakan dalam rangka peningkatan nilai jual adalah mempertahankan agar harga jual tidak mengalami penurunan.

Salah satu indikator/alat ukur yang dapat digunakan untuk menilai tingkat kesejahteraan petani adalah indeks Nilai Tukar

Petani (NTP). NTP merupakan ukuran kemampuan daya beli/daya tukar petani terhadap barang yang dibeli petani. Peningkatan nilai tukar petani menunjukkan peningkatan kemampuan riil petani dan mengindikasikan peningkatan kesejahteraan petani, atau sebaliknya. Pengetahuan secara mendalam tentang perilaku nilai tukar petani, dampak pembangunan, dan identifikasi faktor-faktor penentu nilai tukar akan sangat berguna bagi perencanaan kebijakan pembangunan, perbaikan program-program pembangunan ke depan.

3.5.10 Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan, Jagung, Palawija dan Hortikultura

Kondisi produksi dan produktivitas komoditas pertanian yang diproduksi petani masih jauh dibawah potensi genetiknya karena belum sepenuhnya diterapkannya aplikasi paket teknologi sesuai anjuran. Disisi lain perlu dilakukan upaya peningkatan mutu melalui penerapan GAP (*Good Agriculture Practice*). Selain itu untuk mengurangi biaya pembelian sarana produksi seperti pupuk dan pestisida kimia serta menjaga produktivitas lahan dan air maka perlu diterapkan teknologi pertanian organik yang ramah lingkungan, penerapan system pengendalian hama terpadu, pembukaan lahan tanpa bakar, optimalisasi lahan dan konservasi di lahan kering.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan Jangka Menengah

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, menjawab masalah pokok yang dihadapi oleh perangkat daerah dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan kegiatan dalam melaksanakan visi dan misi RPJMD. Tujuan dicanangkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Dengan berpedoman pada faktor-faktor tersebut diatas, maka Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara, menetapkan tujuan yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pelayanan publik di bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura dan peternakan.
2. Meningkatkan pertumbuhan sub sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura serta peternakan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian Kabupaten Kutai Kartanegara

4.2. Sasaran Jangka Menengah

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata oleh masing – masing tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator beserta targetnya. Oleh karena itu sasaran harus lebih fokus, bersifat spesifik, terinci, dan dapat terukur.

Adapun sasaran yang ingin dicapai pada periode tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

➤ **Tujuan 1:**

Meningkatkan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan kualitas pelayanan publik di bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura dan peternakan.

Sasaran yang hendak dicapai dari tujuan tersebut adalah : meningkatnya kapasitas Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara dari segi kelembagaan, profesionalisme sumberdaya aparatur, dan keuangan daerah dalam rangka pelayanan publik yang prima dan kondusif; dengan indikator : tingkat kepuasan petani/masyarakat tani.

➤ **Tujuan 2 :**

Meningkatkan pertumbuhan sub sector pertanian tanaman pangan dan hortikultura serta peternakan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian Kabupaten Kutai Kartanegara.

Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan tersebut adalah :

- a. Meningkatnya PDRB Sub Sektor Tanaman Pangan; dengan indikator pertumbuhan PDRB sub sektor tanaman pangan.
- b. Meningkatnya PDRB Sub Sektor Hortikultura; dengan indikator pertumbuhan PDRB sub sektor hortikultura.
- c. Meningkatnya PDRB Sub Sektor Peternakan; dengan indikator pertumbuhan PDRB sub sektor peternakan

Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai Dinas Pertanian dan Peternakan 2016-2021

Tujuan	Sasaran
1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pelayanan publik di bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura dan peternakan	Meningkatnya kapasitas Dinas Pertanian dan Peternakan dari segi kelembagaan, profesionalisme sumberdaya aparatur, dan keuangan daerah dalam dalam rangka pelayanan publik yang prima dan kondusif

2. Meningkatkan pertumbuhan sub sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura serta peternakan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian Kabupaten Kutai Kartanegara	1. Meningkatnya PDRB Sub Sektor Tanaman Pangan
	2. Meningkatnya PDRB Sub Sektor Hortikultura
	3. Meningkatnya PDRB Sub Sektor peternakan

Penyajian lebih rinci tujuan, sasaran, indikator tujuan/sasaran dan target kinerja tujuan/sasaran Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2016 – 2021 disajikan dalam table 4.2. berikut ini.

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara yang Maju, Mandiri, Sejahtera, dan Berkeadilan serta tujuan dan sasaran Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara diperlukan strategi dan arah kebijakan pembangunan sub sektor pertanian tanaman pangan, hortikultura dan peternakan) yang terencana dan terukur yang akan dilaksanakan dalam 5 (lima) tahun kedepan.

Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai. Sedangkan arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun mulai 2016 sampai dengan 2021. Arah kebijakan memberi pedoman bagi prioritas dan sasaran pokok tahunan di Renja Dinas Pertanian dan Peternakan. Penetapan arah kebijakan pembangunan mengindikasikan bahwa pembangunan di tahun berkenaan diprioritaskan pada isu atau aspek tertentu untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan secara bertahap dan berkelanjutan.

Strategi Pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara 2016–2021 diarahkan pada 2 (dua) Misi dari 7 (tujuh) Misi GERBANG RAJA (Gerakan Pembangunan Rakyat Sejahtera), yaitu Misi I : memantapkan reformasi birokrasi untuk rakyat, dan Misi 4 : Meningkatkan pengelolaan pertanian dan pariwisata untuk percepatan transformasi struktur ekonomi daerah. Berdasarkan Visi Gerbang Raja, agenda prioritas pembangunan yang terkait

langsung dengan tugas dan fungsi Dinas Pertanian dan Peternakan adalah menitikberatkan pada upaya mendukung 2 (dua) agenda Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, yaitu : 1) Reformasi Birokrasi; 2) Transformasi Struktur Ekonomi Daerah;

5.1. Reformasi Birokrasi

Reformasi Birokrasi pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara, difokuskan dalam rangka mencapai tujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pelayanan publik di bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura dan peternakan.

5.1.1. Meningkatkan kapasitas Dinas Pertanian dan Peternakan dari segi kelembagaan, profesionalisme sumber daya aparatur, dan keuangan daerah

Dalam rangka mencapai sasaran tersebut maka strategi yang ditempuh adalah :

a. Revitalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi unit-unit kerja pada Dinas Pertanian dan Peternakan

Reformasi birokrasi pada Dinas Pertanian dan Peternakan diarahkan untuk mengatasi kondisi sebagai berikut: (1) belum adanya keterpaduan proses perencanaan, penganggaran, sampai dengan pelaporan, (2) SOP belum memadai/optimal, (3) jumlah pegawai yang banyak, (4) ketidaksesuaian antara kompetensi pegawai dengan jabatan yang diduduki, (5) pola pikir dan budaya kerja yang belum mendukung birokrasi yang efektif, efisien, produktif dan profesional, manajemen data di internal yang belum optimal, dan 6) Pemanfaatan hasil diklat yang belum optimal.

Arah Kebijakan:

Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Penghitungan kebutuhan ideal pegawai

1) Pelaksanaan Evaluasi Jabatan

- 2) Penerapan Standar Kompetensi Jabatan Administrator
- 3) Penyusunan dan Penerapan SOP
- 4) Peningkatan kinerja SDM jabatan fungsional
- 5) Analisis kebutuhan diklat
- 6) Pemantapan tunjangan kinerja
- 7) Implementasi standar pelayanan
- 8) Penguatan koordinasi internal
- 9) Pemanfaatan data dan informasi, serta analisis statistik daerah dalam memperkuat perencanaan, prioritas penganggaran, dan evaluasi pembangunan
- 10) Pengembangan sistem perencanaan dan pelaporan terpadu pertanian dan peternakan berbasis IT
- 11) Peningkatan partisipasi dan peran masyarakat dalam pembangunan
- 12) Penerapan pengelolaan arsip secara baik di seluruh unit

b. Revitalisasi Peran Balai Penyuluhan Pertanian dan Peternakan dan UPTD

Arah kebijakan :

- 1) Peningkatan penyediaan informasi pertanian pada BPP dan UPTD, baik informasi tentang teknologi pertanian, pasar produk pertanian, permodalan dan lain-lain.
- 2) Mengintegrasikan fungsi pelayanan administratif, pengumpulan dan pelaporan data statistik pertanian dengan fungsi penyuluhan di tingkat kecamatan ke dalam satu lembaga, yaitu BPP sesuai amanat peraturan perundang-undangan.
- 3) Peningkatan sarana kerja dan sarana operasional lapangan pada BPP/UPTD.

5.2. Transformasi Struktur Ekonomi Daerah

Dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara 2016-2021, tercantum bahwa Transformasi Struktur Ekonomi Daerah, difokuskan dalam rangka mencapai tujuan untuk mewujudkan percepatan kedaulatan pangan dan revolusi pembangunan pertanian dalam arti luas sebagai daya ungkit pertumbuhan ekonomi daerah; mewujudkan Kutai Kartanegara sebagai branding pariwisata unggulan di Kalimantan Timur; serta mewujudkan ekonomi perdesaan berbasis kelompok dan kewirausahaan yang didukung industri dan perdagangan potensial daerah berbasis keterkaitan dan keterpaduan potensi antar wilayah (Integrated Territorial Development). Berikut ini diuraikan strategi yang ditempu dari masing-masing sasaran Renstra Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara 2016-2021.

5.2.1. Meningkatnya Pertumbuhan Sub Sektor Tanaman Pangan, Sub Sektor Hortikultura dan Sub Sektor Peternakan

Dalam rangka mencapai sasaran meningkatnya pertumbuhan sub sektor pertanian tanaman pangan dan sub sector hortikultura, strategi yang ditempuh adalah sebagai berikut :

a. Optimalisasi pengembangan sistem irigasi pertanian dan peningkatan luasan lahan produktif yang beririgasi.

Perubahan iklim global secara nyata telah berdampak negatif pada eksistensi dan keberlanjutan produksi bidang pertanian, khususnya tanaman pangan dan hortikultura. Beberapa indikasi perubahan iklim global yang sangat terkait

dengan aktivitas sektor pertanian yaitu: pergeseran awal musim hujan, pergeseran musim kemarau dan perubahan durasi musim kemarau, fluktuasi curah hujan, perubahan suhu yang drastis, dll. Berbagai dampak negatif atas perubahan iklim global tersebut sangat berpengaruh pada bergesernya atau terlambatnya masa tanam berbagai komoditas pertanian yang berpotensi menurunkan produksi dan produktivitas pertanian.

Keberhasilan dan keberlanjutan produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura juga sangat tergantung pada kondisi infrastruktur dan sistem irigasi pertanian. Secara umum, sistem irigasi di kawasan pertanian Kabupaten Kutai Kartanegara belum memadai dimana irigasi pertanian tidak berjalan optimal atau banyak luasan lahan produktif yang belum mempunyai dukungan infrastruktur dan sistem irigasi yang memadai.

Sebagai solusi untuk mengatasi persoalan dampak negatif atas terjadinya perubahan iklim global dan kondisi atau eksistensi sistem irigasi yang belum optimal, maka diperlukan pengelolaan dan pengembangan sumber daya air untuk pengembangan irigasi pertanian yang dapat melayani kebutuhan air pada lahan-lahan pertanian sepanjang tahun. Pembangunan infrastruktur dan sistem irigasi untuk lahan-lahan pertanian pengembangan baru dan perawatan sistem irigasi yang telah ada perlu dilakukan secara kontinyu.

Arah Kebijakan yang akan ditempuh :

- a) Pembangunan dan pemeliharaan bangunan dan jaringan irigasi yang sesuai dengan ketersediaan sumber-sumber air serta kebutuhan lahan pertanian;
- b) Peningkatan penggunaan teknologi pemanfaatan sumber daya air dalam rangka optimalisasi pemanfaatan/pengelolaan

sumber daya air untuk irigasi pertanian yang dapat melayani lahan sepanjang tahun, pompa, pipanisasi dll.

- c) Pembukaan lahan tanaman pangan baru yang diintegrasikan dengan pembangunan system irigasi.

b. Pengendalian alih fungsi lahan pertanian tanaman pangan dan hortikultura produktif

Sampai dengan saat ini, regulasi dan aturan rinci dan teknis terkait alih fungsi lahan untuk penggunaan pertanian ke penggunaan non-pertanian di tingkat kabupaten belum ada. Oleh karena itu, sangat diperlukan pengembangan database status lahan pertanian produktif yang dapat diakses oleh instansi terkait atau publik.

Arah Kebijakan yang akan ditempuh :

- a) Pengembangan database status lahan pertanian produktif yang dapat diakses oleh instansi terkait atau publik.
- b) Penyusunan dan pengawalan peraturan di tingkat kabupaten tentang mitigasi alih fungsi lahan pertanian pangan produktif (Perda dan Perbup)
- c) Pemanfaatan lahan eks areal pertambangan dan perkebunan yang tidak produktif untuk lahan pengembangan pertanian pangan, hortikultura dan peternakan.

c. Perbaikan infrastruktur pertanian (ketersediaan sarana prasarana pertanian hulu, tengah dan hilir), utamanya pasar.

Selama ini ada indikasi sub sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura kurang menjanjikan sehingga sebagian tenaga kerja produktif yang beraktivitas di sub sektor tersebut

berpindah usaha dari usaha tani ke kegiatan sub sector lain dan non-pertanian terutama pertambangan dan perkebunan.

Arah Kebijakan yang akan ditempuh :

- a) Mendukung perbaikan dan revitalisasi infrastruktur pertanian (ketersediaan sarana prasarana pertanian hulu, tengah dan hilir) seperti alat mesin pertanian (traktor, thresher, transplanter, reaper), pergudangan, sarana transportasi dan logistik produk pertanian, pasar tani/terminal agribisnis, dll
- b) Mengembangkan sistem pemasaran sehingga dapat mendorong peningkatan produksi, produktivitas dan pendapatan bagi tenaga kerja di sektor pertanian

d. Pembukaan lahan/usaha pertanian tanaman pangan yang baru dan peningkatan produktivitas pertanian.

Salah satu aspek penting dalam mendorong peningkatan produksi adalah upaya mempertahankan lahan-lahan pertanian produktif. Selain itu juga berbagai upaya untuk mendorong program (1) intensifikasi, (2) ekstensifikasi dan (3) diversifikasi usaha pertanian.

Arah Kebijakan yang akan ditempuh :

- a) Membuka lahan pertanian baru (untuk usaha tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan) dengan target 10.000 ha dalam kurun waktu 5 tahun
- b) Membangun demplot-demplot sebagai model pengembangan usaha pertanian produktif
- c) Memfasilitasi petani untuk melakukan akses ke lembaga layanan permodalan usaha
- d) Meningkatkan SDM penyuluh dan revitalisasi kelembagaan penyuluhan (Balai Penyuluhan Pertanian)

e) Memperkuat kapasitas dan manajemen kelembagaan usaha organisasi petani.

f) Mendukung penguatan kapasitas kelembagaan usaha ekonomi desa (BUMDES) untuk mendukung usaha pertanian

BAB VI
INDIKATOR KINERJA SKPD
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD seperti yang termuat dalam tabel 6.1 berikut ini :

Tabel 6.1 Indikator Kinerja SKPD Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara 2016-2021

No.	Indikator Sasaran	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Tahun Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Tingkat kepuasan masyarakat (petani) terhadap pelayanan di bidang pertanian	88 %	90	92	93	95	96	98	98
2	Pertumbuhan/kontribusi PDRB sub sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura	8%	4,9	5,	5,2	5,3	5,4	5,5	10,88
3	Penurunan angka kemiskinan pada rumah tangga petani	10 %	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,4	9,83
4	Peningkatan Jumlah Kawasan Pertanian	0 Ha	0	47,5	47,5	47,5	47,5	107	297

BAB VII PENUTUP

Rencana strategis SKPD (Renstra SKPD) adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Kebijakan umum dalam RPJMD memberikan arah perumusan rencana program prioritas pembangunan yang disertai kerangka pengeluaran jangka menengah daerah dan menjadi pedoman bagi SKPD dalam menyusun program dan kegiatan Renstra SKPD. Penyusunan Renstra Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2016-2021 berpedoman kepada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan mengacu Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021.

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Gerbang Raja II, sesuai tugas pokok, fungsi dan peran Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kutai Kartanegara telah merumuskan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan SKPD yang dituangkan dalam arah kebijakan program dan kegiatan. Visi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kutai Kartanegara “Terwujudnya sistem pertanian yang tangguh, maju, berorientasi agribisnis dan berwawasan lingkungan menuju masyarakat tani mandiri dan sejahtera”. Renstra SKPD ini akan diturunkan dalam dokumen perencanaan tahunan (Renja SKPD).